

LAPORAN PP 39

TRIWULAN I TA. 2025

BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan I tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Balai dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan disektor industri. Di samping itu juga dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin turut serta dalam menunjang pembangunan dan pengembangan industri terutama di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

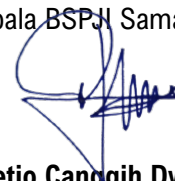
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan I tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2006. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian khususnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda dan sekaligus dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan dalam upaya optimalisasi pencapaian program kerja dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Diharapkan Laporan Triwulan I BSPJI Samarinda Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 14 April 2025

Kepala BSPJI Samarinda,



Risetio Canggih Dwiputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	22
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	38
BAB IV PENUTUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022. Peraturan Menteri tersebut diterbitkan menyusul adanya Permenperin nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang memuat perubahan tugas Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menjadi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

1. 2. Latar Belakang Kegiatan/ Program

Visi

Menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan lingkungan stratejik yang semakin cepat menyebabkan pola pembangunan nasional dan daerah yang mengacu pada format jangka panjang (*longterm planning*) menjadi kurang sesuai dan tidak mampu lagi memberikan hasil yang optimal sebagai akibat dinamika lingkungan stratejik.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan perkembangan teknologi informasi yang cepat, maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI) dituntut untuk meningkatkan perannya sebagai pendukung pembangunan industri di daerah melalui perencanaan yang berorientasi pada hasil.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia

dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Adapun Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut:



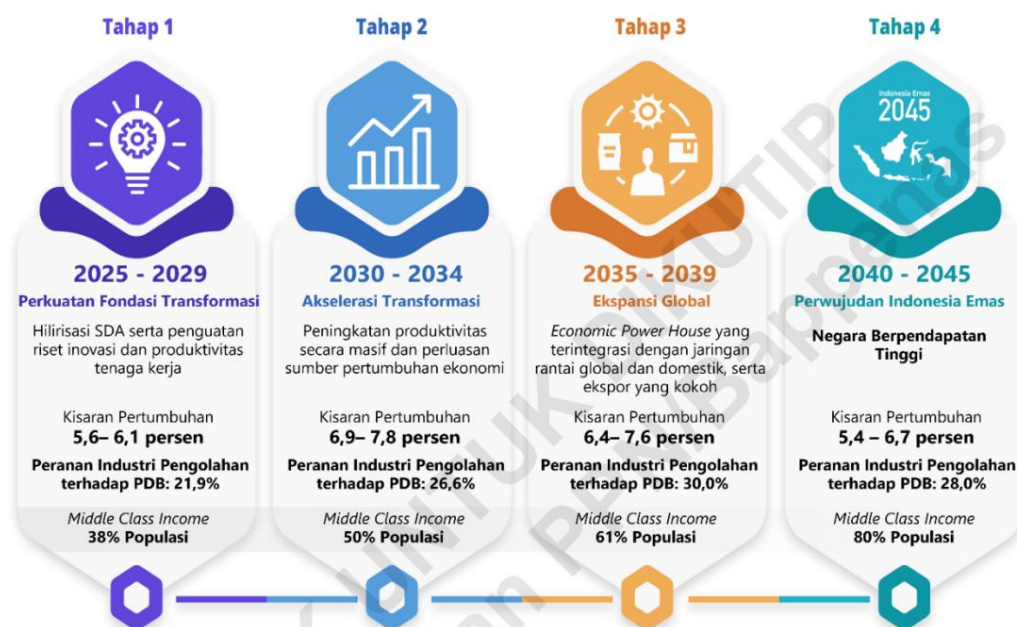
Gambar 1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor) menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2. Tahapan Transformasi Ekonomi

Untuk itu, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB emncapai 21,9%. Selain strategi industrialisasi untuk industri

prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau. Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Usulan visi Kementerian Perindustrian: “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan” dengan pemaknaan:

- Mandiri: Keberlangsungan industri dalam negeri tidak bergantung pada sumber daya luar negeri dan sektor industri menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.
- Maju: Sektor industri berdaya saing, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan.
- Berkelanjutan: Pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bertujuan untuk menjangkau dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

Visi Kementerian Perindustrian seyogianya selaras dengan/mengadopsi visi tersebut di atas. Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, diusulkan visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029:

Visi BSKJI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.”

Dalam rangka mendukung visi BSKJI, BSPJI Samarinda sebagai unit pelaksana teknis dengan wilayah kerja Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ke depan akan memiliki fokus dalam mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan kompetensi regional.

Misi

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standarisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

- Standardisasi industri secara mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri
- Pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri
- Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional
- Penguatan industri hijau secara bertahap
- Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing
- Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standarisasi industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH

dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam mendukung misi BSKJI, BSPJI Samarinda sepenuhnya akan melaksanakan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing dan melaksanakan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel. BSPJI Samarinda akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi yang diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan

Tujuan BSPJI samarinda merujuk kepada tujuan BSKJI yaitu:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

Sasaran Kegiatan

Penentuan sasaran strategis perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Samarinda. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSPJI Samarinda sesuai dengan sasaran strategis BSKJI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Acuan SP BSKJI		Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	
SS1	T3	SP4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
				SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
				SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
SP1	T3	SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	SK3	Terwujudnya SDM yang profesional
SP1	T3	SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
SP1	T4	SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
SP1	T4	SP9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Acuan SP BSKJI		Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	
SS5	T3	SP5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan Sasaran Program dan Tujuan BSKJI serta Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan sasaran kegiatan pada kerangka perspektif BSPJI Samarinda ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Peta Strategis BSPJI Samarinda (2025 – 2029)

Sasaran kegiatan pada perspektif stakeholders merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi harapan pada pemangku kepentingan, yaitu :

1. TJ, Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri, sasaran ini memiliki indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama antara lain :
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,66 dan meningkat hingga 3,68 pada tahun 2029.
 - 2) Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 210 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi dan meningkat menjadi 255 industri/ pelaku usaha/ instansi pada tahun 2029.

2. SK 1, Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 86% dan meningkat menjadi 88% di tahun 2029.
 - 2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 6 dan meningkat menjadi 10 di tahun 2029.
3. SK 2, Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 9,22% dan meningkat menjadi 43,49% pada tahun 2029.
 - 2) Jumlah hasil layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 4.545 dan meningkat menjadi 4.919 pada tahun 2029.
 - 3) Nilai Revenue on Aset (RoA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 8,10% dan meningkat menjadi 8,50% pada tahun 2029.
 - 4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 41,50% dan meningkat menjadi 43,50% pada tahun 2029.

Sasaran kegiatan pada perspektif *internal process* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi pada penyelenggaraan proses internal BSPJI Samarinda, yaitu :

1. SK5, Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan tercapai 50,00% dan tetap 50,00% hingga tahun 2029.
 - 2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 94,98 dan meningkat menjadi 95,15 di tahun 2029.
2. SK7, Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan menjadi 82,00% pada tahun 2029.

Sasaran kegiatan pada perspektif *learn & growth* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu :

3. SK 3, Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Indeks Profesionalitas ASN (IPASN), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh indeks 82,96 dan meningkat menjadi 84,50 pada tahun 2029.
4. SK 4, Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 20% dan meningkat hingga 100% di tahun 2029
 - 2) Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan meningkat menjadi 82,00% di tahun 2029.
 - 3) Indeks Pelayanan Publik (IPP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 4,51 dan meningkat menjadi 4,53 pada tahun 2029.
5. SK6, Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 80,45 dan meningkat hingga mencapai nilai 80,65 di tahun 2029.
 - 2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 94,18 dan meningkat menjadi 94,40 di tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaanya terhadap tujuan BSKJI ditunjukkan pada tabel berikut:

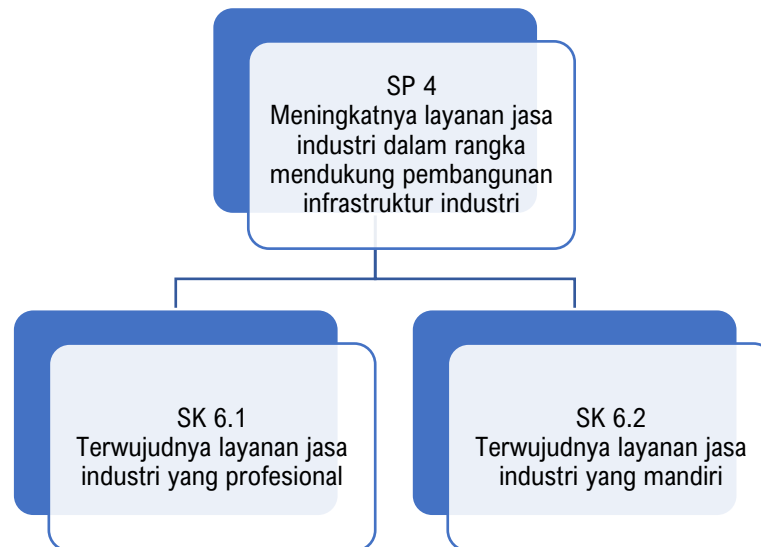
Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Tujuan	TJ/SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
T3	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
T3	TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255
T3	SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional							
T3	IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00
T3	IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	5	6	7	8	9	10
T3	SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
T3	IKK.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	7.187.636.112	9,22	18,19	26,21	34,63	43,49

Tujuan	TJ/SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	IKK.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919
T3	IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
T3	IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50
T3	SK.3	Terwujudnya SDM Profesional							
T3	IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,96	82,96	83,00	83,50	84,00	84,50
T3	SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
T3	IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
T3	IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	0,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
T3	IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,76	4,51	4,51	4,52	4,53	4,53
T4	SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
T4	IKK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	100	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
T4	IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15
T4	SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
T4	IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65
T4	IKK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,40
T3	SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
T3	IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No.3/2014 tentang Perindustrian, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Dalam perumusannya, arah kebijakan ini diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu : SK 6.1 terwujudnya layanan jasa industri yang profesional serta SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 4. Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya layanan jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular. Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut:

Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standardisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standardisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat

standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standardisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standardisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standardisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Meningkatnya perusahaan industri yang produksinya terstandarisasi”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Meningkatkan standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (means) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri.



Gambar 5. Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP 3) yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.1 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur dan SK 4.3 Terwujudnya jasa industri yang profesional. Kedua sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunanya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



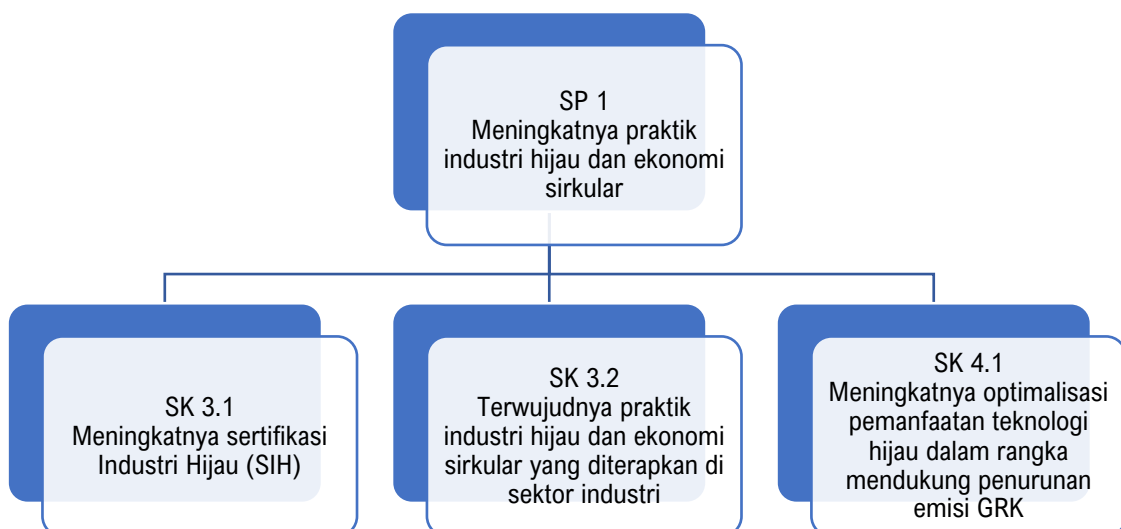
Gambar 6. Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara optimal.

Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/ material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau (SIH); SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.



Gambar 7. Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri Hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/ material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

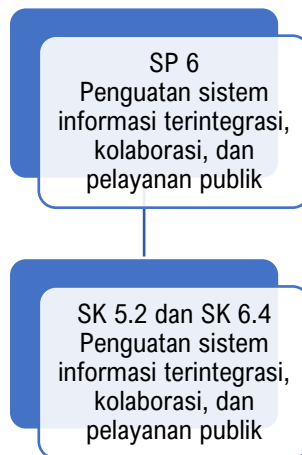
Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam dua Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 6 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik”, SP 7 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 8 “Penguatan akuntabilitas organisasi”.



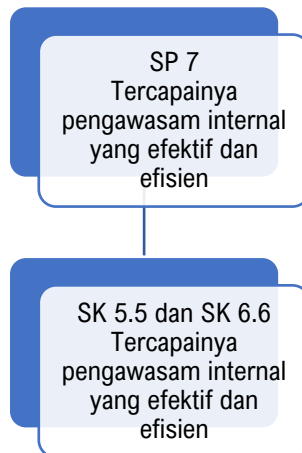
Gambar 8. Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 5 didukung oleh SK 5.1 dan SK 6.3 yang menyasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 5.1 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menyasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.4 melekat pada UPT dan secara khusus menyasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



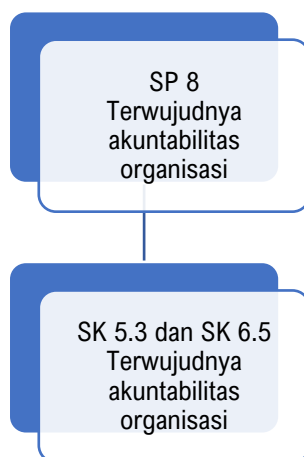
Gambar 9. Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 yang melekat pada Sekretariat BSKJI dan SK 6.4 yang melekat pada UPT. Baik SK 5.2 maupun SK 6.4 sama-sama menasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik.



Gambar 10. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.5 dan SK 6.6 yang sama-sama menasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.5 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.6 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 8 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.5 yang sama-sama menasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A, dan nilai laporan keuangan BSKJI.



Gambar 11. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa Sasaran Program BSKJI melekat pada UPT, pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda yang melekat pada Sasaran Program BSKJI diterjemahkan melalui Sasaran Kegiatan dan diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan. BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sebagai bentuk strategi pencapaian yang dianggap mampu untuk mencapai target yang diharapkan, namun tidak terbatas dan dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan penyesuaian.

Tabel 3. Indikator Kinerja dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Indikator

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri		
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	<i>Temu Pelanggan</i>
TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
			<i>Focus Group Discussion</i>
			<i>Webinar</i>

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional		
IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Uji Profesiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
			<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
			<i>Kalibrasi peralatan uji/proses produksi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
			<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup</i>
IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	<i>Pameran</i>
			<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri		
IKK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Sertifikasi Produk</i>
IKK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Pembimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
			<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	Persen	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
			<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
			<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
			<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional		
IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
			<i>In House Training</i>
			<i>Peningkatan Potensi SDM</i>

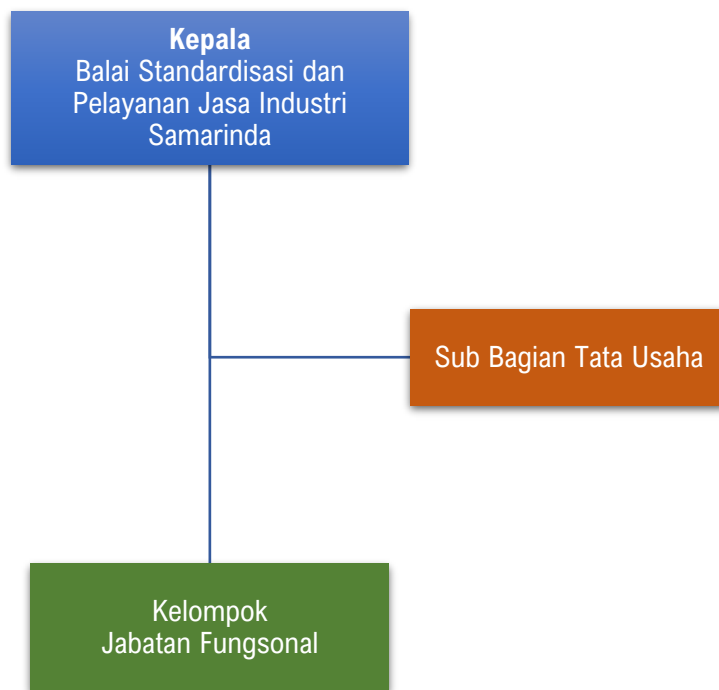
Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik		
IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
			<i>Perawatan Gedung</i>
			<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
			<i>Perawatan Kendaraan</i>
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien		
IKK.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
			<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>
IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi		
IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	<i>Penyusunan Program/Kegiatan</i>
			<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
IKK.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	<i>Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)</i>
			<i>Penatausahaan BMN</i>
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri		
IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>

Nomenklatur Program dan Kegiatan

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menjalankan program dan kegiatan antara lain :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
- b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

1. 3. Struktur Organisasi



Gambar 12. Struktur Organisasi BSPJI Samarinda

BAB II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2. 1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja 2025 merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029, yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan secara tahunan yang berjenjang dan berkelanjutan. Proses perencanaan kinerja telah didokumentasikan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan target kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi organisasi untuk mencapainya dalam satu periode Tahun 2025, yang disusun setiap awal tahun anggaran.

Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menyukseskan Tri Program Utama yang sedang dilaksanakan, yaitu pembangunan di bidang peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pertanian dalam arti luas.

Pada tahun 2025 anggaran kegiatan BSPJI Samarinda yang tertuang dalam dokumen penganggaran DIPA terbagi dalam 2 Program antara lain :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan : 6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- AEC. Kerja sama
- AEF. Sosialisasi dan Diseminasi
- BAD. Pelayanan Publik kepada industri
- BDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri
- CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : 6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal
- EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- EBC. Layanan Manajemen SDM Internal
- EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal

2.1.1. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
AEC	Kerja sama
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>
B	<i>Temu Pelanggan</i>
C	<i>Pameran</i>
D	<i>Webinar</i>
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
BAD	Pelayanan Publik kepada industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>
B	<i>Sampling</i>
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
A	<i>Sertifikasi Produk</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
WA	Program Dukungan Manajemen
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Pengelolaan Data dan Informasi
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>
EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
A	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi</i>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
B	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
C	<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
D	<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
E	<i>Perawatan Gedung</i>
F	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
G	<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
H	<i>Perawatan Kendaraan</i>
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB.951	Layanan Sarana Internal
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
A	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
A	<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
B	<i>Pengadaan Mebelair</i>
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
A	<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
B	<i>In House Training</i>
C	<i>Peningkatan Potensi SDM</i>
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
A	<i>Penyusunan Program/ Kegiatan</i>
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A	<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
A	<i>Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)</i>
B	<i>Penatausahaan BMN</i>
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP
A	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
051	Penyelenggaraan Kearsipan
A	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>

2.1.2. Rincian Anggaran Tahun 2025

Rincian anggaran kegiatan standardisasi dan pelayanan jasa Industri tahun anggaran 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran Tahun 2025 (Revisi DIPA 6)

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5,465,505,000	1,317,214,000	4,148,291,000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	5,465,505,000	1,317,214,000	4,148,291,000
AEC	Kerja sama	154,899,000	28,145,000	126,754,000
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	28,145,000	126,754,000
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	28,145,000	126,754,000
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>	<i>154,899,000</i>	<i>28,145,000</i>	<i>126,754,000</i>
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	629,133,000	377,793,000	251,340,000
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	377,793,000	251,340,000
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	377,793,000	251,340,000
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>	<i>69,227,000</i>	<i>69,227,000</i>	-
B	<i>Temu Pelanggan</i>	<i>187,280,000</i>	<i>187,280,000</i>	-
C	<i>Pameran</i>	<i>100,786,000</i>	<i>100,786,000</i>	-
D	<i>Webinar</i>	<i>8,000,000</i>	<i>8,000,000</i>	-
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>	<i>146,740,000</i>	-	<i>146,740,000</i>
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>	<i>117,100,000</i>	<i>12,500,000</i>	<i>104,600,000</i>
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2,353,451,000	89,562,000	2,263,889,000
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,518,360,000	-	1,518,360,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1,442,720,000	-	1,442,720,000
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>	<i>991,220,000</i>	-	<i>991,220,000</i>
B	<i>Sampling</i>	<i>451,500,000</i>	-	<i>451,500,000</i>
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	75,640,000	-	75,640,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>	<i>75,640,000</i>	-	<i>75,640,000</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	168,664,000	-	168,664,000
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	91,500,000	-	91,500,000
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>	<i>91,500,000</i>	-	<i>91,500,000</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	77,164,000	-	77,164,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>	<i>77,164,000</i>	-	<i>77,164,000</i>
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955,000	89,562,000	392,393,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	82,569,000	13,044,000	69,525,000
A	<i>Sertifikasi Produk</i>	<i>82,569,000</i>	<i>13,044,000</i>	<i>69,525,000</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	399,386,000	76,518,000	322,868,000
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>	<i>316,648,000</i>	<i>41,310,000</i>	<i>275,338,000</i>
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>	<i>82,738,000</i>	<i>35,208,000</i>	<i>47,530,000</i>
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472,000	-	184,472,000
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	184,472,000	-	184,472,000
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>	<i>184,472,000</i>	-	<i>184,472,000</i>
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	320,522,000	-	320,522,000
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522,000	-	320,522,000
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	320,522,000	-	320,522,000
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>	<i>320,522,000</i>	-	<i>320,522,000</i>
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	2,007,500,000	821,714,000	1,185,786,000
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	821,714,000	1,185,786,000
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	821,714,000	1,185,786,000
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>	<i>2,000,000,000</i>	<i>817,214,000</i>	<i>1,182,786,000</i>
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>	<i>7,500,000</i>	<i>4,500,000</i>	<i>3,000,000</i>
WA	Program Dukungan Manajemen	14,190,981,000	1,783,514,000	12,407,467,000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	14,190,981,000	1,783,514,000	12,407,467,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,776,995,000	927,088,000	11,849,907,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
051	Pengelolaan Data dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>	<i>150,000,000</i>	-	<i>150,000,000</i>
EBA.994	Layanan Perkantoran	12,626,995,000	927,088,000	11,699,907,000
001	Gaji dan Tunjangan	8,218,073,000	-	8,218,073,000
A	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi</i>	<i>8,218,073,000</i>	-	<i>8,218,073,000</i>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,408,922,000	927,088,000	3,481,834,000
A	<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>	<i>358,320,000</i>	-	<i>358,320,000</i>
B	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>	<i>2,177,103,000</i>	<i>927,088,000</i>	<i>1,250,015,000</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
C	Layanan Operasional Laboratorium	363,204,000	-	363,204,000
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran	138,432,000	-	138,432,000
E	Perawatan Gedung	371,174,000	-	371,174,000
F	Langganan Daya dan Jasa	614,029,000	-	614,029,000
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran	254,910,000	-	254,910,000
H	Perawatan Kendaraan	131,750,000	-	131,750,000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	326,000,000	243,000,000	83,000,000
A	Pengadaan Pengolah Data	326,000,000	243,000,000	83,000,000
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	295,000,000	139,626,000	155,374,000
A	Pengadaan Alat Perkantoran	194,000,000	139,626,000	54,374,000
B	Pengadaan Mebelair	101,000,000	-	101,000,000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	532,806,000	239,820,000	292,986,000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806,000	239,820,000	292,986,000
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	532,806,000	239,820,000	292,986,000
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai	172,040,000	-	172,040,000
B	In House Training	120,946,000	-	120,946,000
C	Peningkatan Potensi SDM	239,820,000	239,820,000	-
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	260,180,000	233,980,000	26,200,000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370,000	87,370,000	-
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	87,370,000	87,370,000	-
A	Penyusunan Program/ Kegiatan	87,370,000	87,370,000	-
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai	71,110,000	71,110,000	-
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	75,500,000	75,500,000	-
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	75,500,000	75,500,000	-
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)	39,088,000	39,088,000	-
B	Penatausahaan BMN	36,412,000	36,412,000	-
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	21,580,000	-	21,580,000
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	21,580,000	-	21,580,000
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	21,580,000	-	21,580,000
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4,620,000	-	4,620,000
051	Penyelenggaraan Kearsipan	4,620,000	-	4,620,000
A	Penatalaksanaan Kearsipan	4,620,000	-	4,620,000
Total		19,656,486,000	3,100,728,000	16,555,758,000

2. 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

2.2.1. Sasaran dan Indikator Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai BSPJI Samarinda dalam rencana kerja tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis BSPJI Samarinda Tahun yang mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan BSKJI Tahun 2025– 2029, yang terangkum dalam Matriks Alur IKU BSKJI adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri

Indikator Tujuan:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Pengukuran:

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuisioner dan indeks mengacu pada PermenPANRB 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Cara Pengukuran:

Menghitung jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di Satker pada tahun ke-n.

2. Sasaran Kinerja Pertama:

Terwujudnya layanan jasa industri yang professional

Indikator Kinerja:

a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\% \text{ pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\sum \text{Pelayanan yang tepat waktu sesuai SLA}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.

b. Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

Cara Menghitung:

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$\text{NPS} = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

3. Sasaran Kinerja Kedua

Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Indikator Kinerja:

a. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Cara Menghitung:

Menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n dan jumlah PNBP pada tahun n-1 dibagi A dikalikan 100%.

b. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n.

c. Nilai Revenue on Asset (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Cara Menghitung:

Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%.

d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Cara Menghitung:

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

4. Sasaran Kinerja Ketiga

Terwujudnya SDM Profesional

Indikator Kinerja:

a. Indeks Profesionalitas ASN

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Cara Menghitung:

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.

5. Sasaran Kinerja Keempat

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja:

a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

b. Tingkat Penerapan SPBE

Penerapan SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Menghitung capaian LKE SPBE

c. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.

Catatan:

- Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.
- Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.

6. Sasaran Kegiatan Kelima

Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja :

a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Cara Menghitung:

Hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker tahun n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker tahun n-1 dikalikan 100%.

b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada unit kearsipan merujuk pada Peraturan Arsip Nasional nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan.

7. Sasaran Kinerja Keenam

Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Indikator Kinerja:

a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

Cara Menghitung:

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

8. Sasaran Kinerja Ketujuh

Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja:

a. Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung:

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$$

2.2.2. Indikator Kinerja berdasarkan Kegiatan

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		-	
EC.6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		-	
AEC	Kerja sama	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis yang dihasilkan	5	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
AEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		5	Dokumen
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		-	
A	Kerjasama dan Kemitraan		-	
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	Capaian jumlah peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Layanan Teknis	500	Orang
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		500	Orang
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis		-	
A	Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri		-	
B	Temu Pelanggan		-	
C	Pameran		-	
D	Webinar		-	
E	Promosi dan Pemasaran Layanan		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
F	Unit Pelayanan Publik			
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa	386	Industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian		300	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		-	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi		-	
B	Sampling		-	
056	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi/ Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium		-	
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		29	Industri
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		-	
A	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri		-	
052	Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi		-	
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi		44	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		-	
A	Sertifikasi Produk		-	
052	Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi		-	
A	Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi/Witness)		-	
B	Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)		-	
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		13	Industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
A	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Jumlah industri yang dibina	10	Industri, IKM, Miliar, USD
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri		10	Industri
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri		-	
A	Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Sertifikat TKDN IK di Balikpapan		-	
B	Konsultasi dan Fasilitasi Pendaftaran HKI		-	
C	Konsultasi dan Pendampingan Akreditasi Laboratorium SNI/IEC 17025:2017 di Kab. Berau		-	
D	Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Kecil Odah Njadjan melalui Perbaikan Peralatan Pencetakan Oven Sagon		-	
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	59	Unit

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		59	Unit
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		-	
A	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian		-	
B	Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium		-	
WA	Program Dukungan Manajemen		-	
WA.6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri		-	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker	2	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan
051	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
A	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan
001	Gaji dan Tunjangan		-	
A	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi		-	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		-	
A	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen		-	
B	Layanan Operasional Perkantoran		-	
C	Layanan Operasional Laboratorium		-	
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran		-	
E	Perawatan Gedung		-	
F	Langganan Daya dan Jasa		-	
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran		-	
H	Perawatan Kendaraan		-	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal	37	Unit, m2, Paket
EBB.951	Layanan Sarana Internal		37	Unit
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		-	
A	Pengadaan Pengolah Data		-	
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		-	
A	Pengadaan Alat Perkantoran		-	
B	Pengadaan Mebelair		-	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	52	Orang, Layanan, Rekomendasi
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		52	Orang
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		-	
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai		-	
B	In House Training		-	
C	Peningkatan Potensi SDM		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal	6	Dokumen, Layanan, Laporan, Laporan, Rekomendasi
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		-	
A	Penyusunan Program/ Kegiatan		-	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		-	
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai		-	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2	Dokumen
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		-	
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)		-	
B	Penatausahaan BMN		-	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		-	
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		-	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1	Dokumen
051	Penyelenggaraan Kearsipan		-	
A	Penatalaksanaan Kearsipan		-	

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan I tahun anggaran 2025, BSPJI Samarinda telah melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja maupun rencana Aksi TA. 2025. Progres realisasi fisik dari target Perjakin hingga triwulan I mencapai 25,41%. Capaian ini sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana aksi BSPJI Samarinda tahun 2025.

Capaian kinerja BSPJI Samarinda juga mencakup capaian indikator kinerja kegiatan dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Capaian kinerja keuangan telah terealisasi sebesar 23,4% menurut Sistem Informasi Keuangan (Intranew) berbasis AkruaI terhadap Pagu Efektif sedangkan menurut aplikasi OMSPAN adalah 18,25%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan capaian kinerja keuangan dalam Sistem Informasi Keuangan (Intranew) dan OMPSPAN, hal ini disebabkan terdapat beberapa transaksi yang telah tercatat dalam Aplikasi Intranew masih dalam proses penerbitan SP2D. Capaian kinerja keuangan telah melebihi target yang ditetapkan oleh BSKJI untuk triwulan I yaitu 22,34%. Adapun capaian kinerja fisik menurut perhitungan realisasi fisik perjanjian kinerja diperoleh sebesar 25,41 dan telah melebihi target yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu 25%.

Pada pelaksanaan kegiatan BSPJI Samarinda menerapkan optimalisasi sumber daya baik anggaran, SDM serta sarana dan prasarana yang dimaksudkan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat menunjang tercapainya seluruh target tersebut. Langkah optimalisasi sumber daya diharapkan berdampak pada terciptanya efisiensi anggaran. Pada Triwulan I telah dilakukan 2 kali revisi DIPA kewenangan DJA dan 4 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Revisi DIPA kewenangan DJA dilaksanakan dalam rangka pencantuman blokir belanja sebagai tindak lanjut atas arahan efisiensi belanja pemerintah tahun 2025. Selanjutnya, revisi DIPA kewenangan KPA dilaksanakan dalam rangka revisi administrasi. Dengan berakhirnya Triwulan I, maka secara keseluruhan BSPJI Samarinda telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 6 kali dalam Tahun 2025.

Tabel 7. Rencana Aksi TA. 2025

Unit Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi																		
						Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV						
						Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan					
1	2	3		4		5	6			7	8			9	10			11	12					
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	24%	1	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			48%	4	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			72%	7	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			100%	10	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	
							2	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				5	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				8	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				11	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	
							3	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				6	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				9	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				12	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
		TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	210	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25%	1 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Penyusunan jadwal audit perusahaan dan pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal serta Sertifikasi produk	50%	4 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri	75%	7 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi	100%	10 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri
							2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Verifikasi dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
							3	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		6	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		9	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		12	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	Persen	25%	1	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	50%	4	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	75%	7	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	100%	10	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2		5		8		11
							a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan
							3		6		9		12
							a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan
		SK.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	6	Nilai	24%	1	48%	4	72%	7	100%	10
							Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial
							2		5		8		11
							Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial
							3		6		9		12
							Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	Persen	25%	1	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	50%	4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	75%	7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	100%	10	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA
							2	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		5	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		8	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		11	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		9 a) Melakukan) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		12) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA
		SK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	4545	Hasil Layanan	25%	1 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	50%	4 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	75%	7 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	100%	10 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		12 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
		SK.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	Persen	20%	1 a) Penyampaian Laporan b) Pengawasan BMN untuk TA. 2024 c) Penyiapan konsep laporan BMN d) Inventarisasi BMN yang akan diusulkan penghapusan	45%	4 a) Lanjutan proses pengadaan Mebelair b) Proses Lelang Barang Inventaris Kantor c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	70%	7 a) Penyampaian Lap. Wasdal Semester I b) Pengusulan PSP untuk pengadaan Semester 1 c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL d) Penyusunan Laporan BMN Semester 1 2025	100%	10 a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Lanjutan Pengadaan Mebelair dan Inventaris Kantor Lainnya

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Koordinasi dengan KPKNL terkait usulan proses penghapusan b) Hunting Penyedia pengadaan alat laboratorium & pengolah data melalui E-Catalog c) Proses Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data Reviu Laporan BMN Unaudited TA. 2024 d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		5 a) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Lelang Inventaris kantor b) Hunting Penyedia dan Koordinasi terkait pengadaan AC, dll c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		8 a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		11 a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Penyelesaian To Do List Triwulan III
							3 a) Penyiapan dokumen usulan penghapusan BMN b) Pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor c) Penyiapan proses pengadaan meubelair d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		6 a) Pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan Gedung kantor tahap 2 b) Pengusulan RKBMN c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		9 a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		12 a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Pengusulan PSP untuk pengadaan belanja modal Semester 2 c) Perhitungan dan Evaluasi capaian nilai ROA d) Penyelesaian To Do List Triwulan III
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	Persen	20%	1 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	50%	4 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBp BLU	75%	7 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	100%	10 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBp BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBp BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBp BLU

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		5 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		8 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		11 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU
							3 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		6 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		9 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		12 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	82,96	Indeks	25%	1 a) Membuat laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi TA. 2024 b) Identifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing Ketua Tim c) Perencanaan pelatihan pengadaan Barang/Jasa	50%	4 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan	75%	7 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Penetapan nilai sementara IP ASN Semester I	100%	10 a) Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran b) Revisi anggaran pengembangan kompetensi (bila diperlukan)

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Membuat program pelatihan tahun 2025 b) Pelaksanaan pelatihan bidang sertifikasi dan pengujian		5 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan		8 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 1		11 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terkait pengembangan layanan
							3 a) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan I b) Revisi kegiatan pengembangan kompetensi		6 a) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan b) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan II		9 Pelaksanaan Pelatihan pengembangan kompetensi non teknis (In House Training)		12 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 2
							1 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		4 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		7 Membuat perencanaan pengembangan aplikasi SILABISA		10 Melakukan pengujian pengembangan aplikasi SILABISA
							2 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		5 Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA		8 Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA		11 Melakukan Implementasi pengembangan aplikasi SILABISA
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	15%	3 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	40%	6 Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA	80%	9 Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA	100%	12 Kegiatan selesai
							1 Membuat data dukung LKE SPBE		4 Membuat data dukung LKE SPBE		7 Membuat data dukung LKE SPBE		10 Membuat data dukung LKE SPBE
							2 Membuat data dukung LKE SPBE		5 Membuat data dukung LKE SPBE		8 Membuat data dukung LKE SPBE		11 Membuat data dukung LKE SPBE
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	15%	3 Membuat data dukung LKE SPBE	35%	6 Membuat data dukung LKE SPBE	70%	9 Membuat data dukung LKE SPBE	100%	12 Kegiatan selesai

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
						Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	15%	1	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	40%	4	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	70%	7	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	100%	10	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							2	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		5	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan e) Penyusunan perubahan SPM		8	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		11	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							3	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		6	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduane) Penyusunan perubahan SPM		9	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		12	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00	Persen	20%	1	Menyelesaikan seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan kegiatan TA. 2024	80%	4	Mereviu Laporan hasil Pemeriksaan Audit Kinerja	100%	7	Monitoring progress penyampaian tindak lanjut LHP Ke Sekretariat Inspektorat Jenderal		10	Kegiatan selesai
							2	Pengumpulan permintaan data dukung untuk keperluan Audit Kinerja Inspektorat		5	Menyelesaikan saran-saran tindaklanjut audit kinerja yang tercantum dalam LHP		8	Reviu Tindak Lanjut LHP oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal		11	Kegiatan selesai

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
						Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
							3	Koordinasi dengan tim auditor terkait jadwal rencana audit		6	Penyampaian hasil tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Inspektorat Jebderal		9	Kegiatan selesai		12	Kegiatan selesai
		SK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98	Nilai	20%	1	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide Primer, Skunder dan Tersier	50%	4	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan penyimpanan arsip aktif di Ruang Central File	80%	7	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Januari – Juni)	100%	10	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksanakan pemberkasan arsip aktif
							2	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c) Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal		5	a)nPengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan pengelolaan arsip vital c) Melakukan perlindungan arsip vital		8	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyusun daftar arsip aktif		11	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksankan penyimpanan arsip aktif
							3	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penerapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas		6	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif		9	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan srikandi c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif		12	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Juli-Desember) c) Melaksanakan Pemindahan arsip dari unit pengolah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip mewakili fungsi satker d) Membuat berita acara pemindahan arsip

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi															
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
						Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan					
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12					
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	Nilai	25%	1	a) Penyelesaian dan Reviu LAK 2024 b) Penyusunan Revisi RSB 2023-2027 c) Rapat Kerja 2025		50%	4	a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Renstra 2025-2029		75%	7	Penyusunan Laporan PP 39 TW 2		100%	10	a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Indikatif TA.2027	
							2	a) Kick Off Pelaksanaan Kegiatan TA. 2025b) Penyusunan Renkin TA. 2026 c) Evaluasi SAKIP TA. 2024			5	a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026b) Penyusunan RBA 2026 definitive			8	Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026			11	a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027b) Rapat Monev TW 4	
							3	a) Pengumpulan usulan KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 1 c) Pelaporan Monev BAPPENAS			6	a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2 c) Pelaporan Monev BAPPENAS			9	a) Reviu DJA KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 3 c) Pelaporan Monev BAPPENAS			12	a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4	
		SK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	Nilai	24%	1	a) Revisi DIPA awal dan Pencantuman Saldo Awal b) Penyusunan Rencana Belanja per Kegiatan (Sub Komponen) c) Pengajuan UP d) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Januari		48%	4	a) Pelaporan CAPUT Maret b) Revisi DIPA TW 2 Pemutakhiran RPD (maks 10 April) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja April d) Pengajuan GUP April		72%	7	a) Pelaporan CAPUT Juni b) Revisi DIPA TW 3 Pemutakhiran RPD (maks 10 Juli) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juli d) Pengajuan GUP Juli		100%	10	a) Pelaporan CAPUT September b) Revisi DIPA TW 4 Pemutakhiran RPD (maks 10 Oktober) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Oktober d) Pengajuan GUP Oktober	
							2	a) Penyusunan RPD (maks 10 Februari) b) Pelaporan CAPUT Januari c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Februari d) Pengajuan GUP Februari			5	a) Pelaporan CAPUT April b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Mei c) Pengajuan GUP Mei			8	a) Pelaporan CAPUT Juli b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Agustus c) Pengajuan GUP Agustus			11	a) Pelaporan CAPUT Oktober b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja November b) Pengajuan TUP Pengajuan GUP November	
							3	a) Pelaporan CAPUT Februari b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Maret c) Pengajuan GUP Maret d) Monev Penyerapan Anggaran TW 1			6	a) Pelaporan CAPUT Mei b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juni c) Pengajuan GUP Juni d) Monev Penyerapan Anggaran TW 2			9	a) Pelaporan CAPUT Agustus b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja September c) Pengajuan GUP September d) Monev Penyerapan Anggaran TW 3			12	a) Pelaporan CAPUT November b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Desember c) GUP/TUP Nihil d) Monev Penyerapan Anggaran TW 4	

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi													
						Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12			
8	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.7.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	80,00	Persen	20%	1	Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP	45%	4	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan I 2024	75%	7	a) Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan II 2024	100%	10	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan III & IV 2024		
							2	Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE		5	Koordinasi pelaksanaan pengadaan tambahan alat laboratorium		8	Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		11	Evaluasi capaian penggunaan TKD pada pengadaan barang/ jasa Semester II TA. 2024		
							3	a) Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia		6	Monitoring capaian penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I dan monitoring progress usulan izin impor		9	Proses Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium		12	Evaluasi penyelesaian pengadaan barang/ jasa		
						22%			49%			76%			100%				

3.3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat 1 (satu) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan total 17 (tujuh belas) indikator yang harus dicapai. BSPJI Samarinda melaksanakan seluruh kegiatan dengan berfokus pada seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal dan mampu memberikan *outcome* bagi masyarakat serta mencapai tujuan yang telah tertuang dalam renstra. Realisasi capaian kinerja BSPJI Samarinda berdasarkan indikator pada Perjanjian Kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana aksi. Pada Triwulan I diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 25,41%.

Pada Tujuan Kegiatan, yakni **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri**, untuk indikator pertama *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*, pada Triwulan I telah diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,82 dengan mutu pelayanan 95,76 (Sangat Baik). Selanjutnya indikator kedua *“Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri”*, pada Triwulan I terdapat 91 perusahaan yang telah memanfaatkan layanan jasa industri BSPJI Samarinda.

Pada Sasaran Kegiatan pertama, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional**, untuk indikator pertama *“Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)”*, pada Triwulan I diperoleh capaian SLA sebesar 98,07% untuk seluruh layanan jasa di BSPJI Samarinda. Selanjutnya, indikator kedua *“Nilai Net Promoter Score (NPS)”*, pada Triwulan I telah dilakukan penyampaian survei NPS dan telah diperoleh nilai NPS sebesar 50 dari 4 orang pelanggan BSPJI Samarinda.

Pada sasaran kegiatan kedua, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri**, untuk indikator pertama *“Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”*, pada Triwulan I diperoleh penerimaan PNBP sebesar Rp. 960.318.766. Selanjutnya, indikator kedua *“Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri”*, pada Triwulan I diperoleh jumlah layanan jasa yang telah digunakan oleh pelanggan BSPJI Samarinda sebanyak 841 order. Pada indikator ketiga, *“Nilai Revenue on Asset (RoA)”*, pada Triwulan I telah dilakukan perhitungan RoA dengan hasil sebesar 2,45%. Pada indikator keempat, *“Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)”*, pada Triwulan I berdasarkan perhitungan diperoleh rasio POBO sebesar 30,10%.

Pada sasaran kegiatan ketiga, yakni **Terwujudnya SDM Profesional**, dengan indikator *“Indeks Profesionalitas ASN”*, dilaksanakan melalui pengukuran IP ASN berdasarkan data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seluruh pegawai yang pada triwulan ini berdasarkan data yang diperoleh dari Intranet Kementerian Perindustrian. Pada triwulan I belum diterima hasil penilaian IP ASN dari Biro OSDM, namun kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilaksanakan

Pada sasaran kegiatan keempat, yakni **Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik**, untuk indikator pertama *“Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI”*, pada triwulan I telah dilakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi melalui identifikasi kebutuhan teknis Layanan Jasa Pengujian dan Kalibrasi yang akan dituangkan kedalam sistem aplikasi SILABISA. Selanjutnya, indikator kedua *“Tingkat Penerapan SPBE”*, pada Triwulan I telah dilakukan analisis terhadap 38 item pada LKE SPBE untuk memperoleh gambaran tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda. Pada indikator ketiga, *“Indeks Pelayanan Publik (IPP)”*, pada Triwulan I diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,63 dan masuk dalam kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”.

Pada sasaran kegiatan kelima, **Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**, indikator pertama *“Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker”*, pada Triwulan I telah dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hasil temuan Audit Kinerja yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Indikator kedua, *“Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)”* pada Triwulan I telah lakukan kegiatan pengelolaan pengadministrasian naskah dinas masuk internal maupun eksternal pada SRIKANDI, penyeleksian arsip inaktif yang akan dimusnahkan, serta pembuatan daftar berkas arsip usul musnah.

Pada sasaran keenam, **Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi**, pada indikator pertama *“Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker”*, dimana pada triwulan ini penilaian SAKIP telah dilaksanakan dan diperoleh bahwa nilai SAKIP BSPJI Samarinda mengalami peningkatan dari tahun lalu. Pada indikator kedua, *“Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”*, pada triwulan ini diperoleh nilai IKPA sebesar 100.

Pada sasaran ketujuh, **Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri** dengan indikator *“Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”*, pada Triwulan I telah diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 28,69%.

Tabel Realisasi Rencana Aksi Sampai Triwulan I TA. 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat dilihat pada bagian lampiran. Selanjutnya, berikut pembahasan masing-masing capaian indikator kinerja pada Triwulan I:

TJ : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8. Capaian Kinerja TJ

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,66	3,82	104,37	24	24	B1: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B2: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B3: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B1: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B2: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B3: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan c) Melakukan analisis hasil survei kepuasan responden yang memberi nilai di bawah 3,66
		Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	210			25	25	B1: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Penyusunan jadwal audit perusahaan dan pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal serta Sertifikasi produk B2:	B1: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi; c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi seperti unsur hara pada jaringan tanaman d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Meningkatkan kualitas Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Verifikasi dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk B3: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga dalam rangka peninjauan kerjasama B2: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi; c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi seperti unsur hara pada jaringan tanaman d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga dalam rangka peninjauan kerjasama B3: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi; c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi seperti unsur hara pada jaringan tanaman d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga dalam rangka penjajakan kerjasama

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Tujuan 1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 24% dengan realisasi 24%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA, pemantauan pengaduan pelanggan, serta melakukan analisis hasil survei kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66.

Hasil survei indeks kepuasan masyarakat sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 diperoleh dari penilaian 60 responden dari jumlah total sebanyak 84 pengguna jasa. Keseluruhan responden yang melakukan survei merupakan pengguna jasa dengan layanan jasa Pengujian, sedangkan layanan jasa selain pengujian belum terdapat responden yang melakukan pengisian pada survei. Berdasarkan data survei yang diterima, penilaian indeks responden dapat dikelompokkan seperti tabel berikut:

Tabel 9. Klasifikasi Nilai Indeks

Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Indeks 4	Total Responden	Jumlah Pengguna Jasa
0	1	18	41	60	84

Nilai perolehan indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah 3,82 dengan mutu pelayanan 95,76 (Sangat Baik) sesuai dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 10. Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata unsur	Nilai rata-rata (NRR) Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,86	0,42
U2	Prosedur	3,87	0,43
U3	Waktu pelayanan	3,86	0,42
U4	Biaya/Tarif	3,81	0,42
U5	Produk layanan	3,85	0,42
U6	Kompetensi Pelaksana	3,89	0,43
U7	Perilaku Pelaksana	3,89	0,43
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,88	0,43
U9	Sarana dan Prasarana	3,91	0,43
Indeks Kepuasan Masyarakat (Σ NRR Tertimbang)			3,82
IKM Unit Pelayanan (Σ NRR Tertimbang x 25)			95,76
Mutu Pelayanan			Sangat Baik

Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan I tahun 2025, maka hasil yang diperoleh 3,82 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,66.

b) Kendala

- Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa.
- Adanya keterbatasan petugas dalam memonitoring pengguna jasa apakah telah melakukan survei secara konvensional pada layanan selain jasa pengujian karena sifat pengisiannya sukarela.
- Kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survei kepuasan masyarakat dan keterbatasan SDM responden dalam melakukan survei.
- Beberapa responden memberikan penilaian survei kurang baik karena hasil uji sample pada layanan pengujian tidak sesuai harapan pengguna jasa

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan pengisian responden pada layanan kalibrasi, pelatihan, konsultasi dan sertifikasi.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah tersedianya sistem survei terhadap seluruh jenis pelayanan melalui sistem informasi serta dilakukan sosialisasi pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui sosial media, serta himbauan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan jumlah responden.

Indikator Tujuan 2: Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI pada tahun berjalan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 25% dengan realisasi 25%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Selanjutnya pada Triwulan I juga dilakukan pembuatan database industri potensial area Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, perbaikan dan update data pada booklet layanan secara berkala sesuai dengan pengembangan layanan yang telah dilakukan, peningkatan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA, pemberian program – program layanan promosi untuk meningkatkan serta pelaksanaan evaluasi perbaikan layanan melalui survei kepuasan pelanggan. Adapun jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa pada Triwulan I ada sebanyak 91 Industri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri

Jenis Layanan	Jan	Feb	Mar	Total Industri Triwulan I
Pengujian	47	52	39	84
Kalibrasi	0	1	1	1
Sertifikasi Produk	0	0	1	1
Pemeriksaan Halal	0	1	1	2
Pelatihan	0	0	0	0
Konsultasi	0	0	0	0
Verifikasi TKDN	0	1	0	1
Narasumber/Pengajar	0	1	1	2
Total Keseluruhan	47	56	43	91

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri pada periode Triwulan I tahun 2025 mencapai 91 perusahaan terhadap target 210 perusahaan sehingga diperoleh capaian sebesar 43,33%.

b) Kendala

Pada periode Triwulan I capaian jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri sudah cukup baik, namun belum terdapat order pelatihan dan konsultasi.

c) Tindak Lanjut

Diperlukan kerjasama dari semua pihak baik dari tim layanan maupun tim pemasaran dalam memasarkan layanan jasa ke pelanggan yang potensial sehingga industri yang dilayani mengalami peningkatan selain itu diperlukan penambahan jumlah parameter layanan yang terakreditasi.

SK 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional

Tabel 12. Capaian Kinerja SK 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	98,07	114,03	25	25	B1: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan B2: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B1: Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia dan pemeliharaan peralatan B2: Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia dan pemeliharaan peralatan B3: Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia dan pemeliharaan peralatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								B3: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	6	-	-	24	24	B1: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial B2: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial B3: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B1: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS) B2: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS) B3: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Kinerja 1: Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya

mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 24% dengan realisasi 24%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tercapainya target waktu penyelesaian layanan jasa teknis industri serta melakukan identifikasi dan tindak lanjut terhadap kendala pencapaian sasaran. Adapun jenis layanan jasa industri yang dimaksud berupa layanan jasa pengujian dan kalibrasi, layanan jasa sertifikasi, layanan jasa konsultasi.

Adapun capaian pada masing-masing SLA untuk jasa layanan di BSPJI Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi SLA

No	Jenis Layanan	Capaian Mutu sesuai SLA (%)		
		Januari	Februari	Maret
1	Pengujian dan Kalibrasi	96,11	94,32	100
2	Sertifikasi	-	100	-
3	Bimbingan dan Konsultasi	-	100	-
Rata-rata		96,11	98,11	100
Rata-rata TW I		98,07		

Hasil capaian mutu (target penyelesaian) layanan jasa teknis pada Triwulan I adalah sebesar 98,07%, dimana capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 86%.

b) Kendala

Kendala yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target kedepannya adalah pada pengadaan bahan kimia untuk pengujian mikrobiologi yang masih *indent* sehingga nantinya dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelayanannya. Dalam pencapaian target ketepatan waktu sampel di kegiatan pengujian dan kalibrasi diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis pengujian serta dilakukan pencegahan terhadap hal-hal yang menghambat pencapaian target penyelesaian.

Selanjutnya, untuk kegiatan sertifikasi, bimbingan dan konsultasi belum ditemukan kendala terkait pelaksanaannya.

c) Tindak Lanjut

Dalam menindaklanjuti kondisi pengadaan bahan kimia untuk Laboratorium Mikrobiologi, tim laboratorium akan mengupayakan pemesanan bahan kimia di awal serta mencoba metode pengujian alternatif yang sesuai dengan metode yang lama. Selanjutnya, Diperlukan kerjasama dari semua tim kerja dalam pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah

ditetapkan. Selain itu, diperlukan juga perencanaan yang lebih matang dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, penjadwalan sampling serta kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.

Indikator Kinerja 2: Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 24% dengan realisasi 24%

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah melakukan survei NPS pada pelanggan yang menggunakan layanan jasa industri serta melakukan analisis hasil survei kepada responden yang memberi nilai survei.

Hasil survei NPS sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 diperoleh dari penilaian dari 4 (empat) responden dari jumlah total sebanyak 91 pengguna jasa.

Berdasarkan data survei yang diterima, hasil survei NPS periode Triwulan I seperti tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Survei NPS Triwulan I

Nama	Perusahaan / Instansi	"Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Layanan BSPJI Samarinda kepada teman atau rekan bisnis anda?"
Sumber Arif Fahrudin	Dinas Lingkungan Hidup	9
Aryani Retno	Kaltim Parna Industri	8
Sigit Purnomo	PT. Natura Pasific Nusantara	8
Putri Rahayu	DLH Bontang	10

Berdasarkan tabel diatas berikut hasil perhitungan NPS :

Dari survei NPS diterima data 4 responden tanggapan. Dari tanggapan tersebut diperoleh nilai :

- 2 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)
- 2 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)
- 0 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (*Detractors*)

Maka Nilai NPS yang diperoleh adalah:

$$\% \text{ Promoters: } (2/4) \times 100 = 50$$

$$\% \text{ Detractors: } (0/4) \times 100 = 0$$

$$\text{NPS} = 50 - 0 = 50$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh skor NPS periode Triwulan 1 adalah 50, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

b) Kendala

Pelaksanaan survei *Net Promotore Score* (NPS) masih dilakukan secara manual sehingga jumlah responden belum maksimal

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah responden yang mengikuti survei NPS masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA

SK 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri

Tabel 15. Capaian Kinerja SK 2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	-	-	25	25	B1: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA B2: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap	B1: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi SILABISA c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Promosi dan Kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan B2: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi SILABISA c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Promosi dan Kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								capaian PNBP di aplikasi SILABISA B3: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA	B3: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi SILABISA c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Promosi dan Kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan
		Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	4500	-	-	25	25	B1: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA B2: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi Tim Tc) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B1: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi silabisa b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B2: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi silabisa b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B3: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi silabisa b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								B3: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	
		Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	2,45	30,24	20	20	B1: a) Penyampaian Laporan b) Pengawasan BMN untuk TA. 2024 c) Penyiapan konsep laporan BMN d) Inventarisasi BMN yang akan diusulkan penghapusan B2: a) Koordinasi dengan KPKNL terkait usulan proses penghapusan b) Hunting Penyedia pengadaan alat laboratorium & pengolah data melalui E-Catalog c) Proses Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data Reviu Laporan BMN Unaudited TA. 2024 d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL B3: a) Penyiapan dokumen usulan penghapusan BMN b) Pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor	B1: a) Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 TA 2024 kepada BSKJI pada tanggal 14 Januari 2025. b) Menyiapkan konsep Laporan BMN Semester 2 dan Tahunan untuk TA 2024. c) Melakukan Inventarisasi dan pendataan BMN yang akan diusulkan penghapusan. B2: a) Melaksanakan survei harga pasar untuk penentuan HPS pada pengadaan alat laboratorium & pengolah data. b) Melaksanakan Proses Persiapan kelengkapan dokumen untuk Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data c) Melakukan penyusunan Laporan BMN Semester 2 dan Tahunan untuk TA 2024 d) Penyampaian Laporan BMN Unaudited Semester 2 dan Tahunan untuk TA 2024 kepada Biro Keuangan pada tanggal 10 Februari 2025. e) Telah dilakukan reviu oleh Tim APIP dan telah terbit CHR atas Laporan BMN Unaudited Semester 2 dan Tahunan untuk untuk TA 2024.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								c) Penyiapan proses pengadaan meubelair d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	f) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Januari Tahun 2025 kepada KPKNL Samarinda. B3: a) Melakukan persiapan kelengkapan dokumen untuk pengajuan usulan penghapusan BMN. b) Penyampaian Nota Dinas kepada Sekretaris Jenderal tentang permohonan persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau bangunan pada BSPJI Samarinda tanggal 12 Maret 2025. c) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Februari Tahun 2025 kepada KPKNL Samarinda. d) Melaksanakan survei harga pasar untuk penentuan HPS pada pengadaan meubelair.
		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	30,10	72,53	20	20	B1: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya B2: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	B1: a) Telah dibuat dan disampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 6 Januari 2025 b) Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 31 Januari 2025 B2: a) Telah dibuat dan disampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 5 Februari 2025 b) Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 25 Februari 2025 dengan No SP2D B3: a) Telah dibuat dan disampaikan target

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								c) Monitoring penagihan piutang PNBPU BLU B3: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPU BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU ke PPK BLU pada tanggal 6 Maret 2025 b) Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBPU BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 27 Maret 2025

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini :

1) Indikator Kinerja 1 : Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 25% dengan realisasi 25%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Selain itu, dilakukan pula kegiatan dalam rangka inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama dengan pelanggan yang ada seperti PT. Lamindo Intermultikon, PT. Baker Hughes Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, PT. Petro Andalan Nusantara, PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Putra Bongan Jaya, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, CV. Bintang Mas Jaya Lembuswana, PT. Kaltim Parna Industri, Klinik Minta Sehat, PT. Sarana Abadi Lestari, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, PT. Syam Surya Mandiri, PT. Mega Prima Persada, RSUD I. A. Moeis, dan RS Pratama Nawacita Datar Dave.

Tabel 16. Pendapatan PNBPN berdasarkan Pembukuan Bendahara Penerimaan

No.	Layanan	Januari	Februari	Maret	Total Realisasi TW I
A	424113 (Jasa Pelayanan)	430.095.500	227.361.544	296.776.850	954.233.894
1.	Pengujian	251.049.500	179.798.100	281.341.850	712.189.450
	- Transportasi dan Akomodasi	150.000	2.557.000	15.435.000	18.142.000
2.	Kalibrasi	-	20.220.444	-	20.220.444
3.	Sertifikasi Produk	4.900.000	-	-	4.900.000
4.	Pemeriksaan Halal	7.996.000	4.932.000	-	12.928.000
5.	Pelatihan	-	-	-	-
6.	Konsultasi	166.000.000	-	-	166.000.000
7.	Verifikasi TKDN	-	15.620.000	-	15.620.000
8.	Narasumber /Pengajar	-	4.234.000	-	4.234.000
B	424911 (Jasa Perbankan)	3.698.280	3.481.457	12.135	7.191.872
	Jasa Giro	3.698.280	3.481.457	12.135	7.191.872
Total Pendapatan		433.793.780	230.843.001	296.776.850	961.425.766

Pada Triwulan I, telah diperoleh PNBPN sebesar Rp. 961.425.766 berdasarkan pembukuan bendahara penerimaan. Sementara, berdasarkan data pengesahan (Omspan) diperoleh PNBPN sebesar Rp. 960.318.766.

Dari jumlah PNBPN (berdasarkan pembukuan bendahara penerimaan), diperoleh capaian PNBPN sebesar 12,25% dari target PNBPN sebesar Rp. 7.850.000.000 (meningkat 9,22% dari capaian PNBPN tahun sebelumnya).

b) Kendala

Target PNBPN pada Triwulan I telah mencapai target namun belum mencakup pada semua layanan jasa misalnya pada layanan jasa pelatihan belum mendapatkan pendapatan pada Triwulan I. Selain itu, pada layanan sertifikasi dan halal, permohonan dari pelanggan untuk layanan masih kurang serta keberadaan industri yang wajib SNI di Kaltim jumlahnya masih terbatas. Sedangkan jika dilihat pada periode bulan Maret, penerimaan PNBPN hanya mengandalkan dari Layanan Jasa Pengujian dan Transportasi dan Akomodasi.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu ditingkatkan lagi proporsi pendapatan layanan jasa lain selain Jasa Pengujian. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan peningkatan promosi layanan Jasa Lainnya selain Layanan Jasa Pengujian.

2) Indikator Kinerja 2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri.

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Jumlah hasil layanan yang dimaksud adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 25% dengan realisasi 25%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Dalam rangka meningkatkan jumlah hasil layanan juga telah dilakukan pengumpulan data industri area Kalimantan Timur yaitu koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sehingga diperoleh data Perusahaan/Industri Pertambangan Batubara dan Perkebunan Kelapa Sawit yang tersebar di Seluruh Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur, selain itu terdapat juga data Industri lain seperti Perhotelan, Rumah Sakit dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan kunjungan dalam rangka peninjauan kerjasama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, PT.Triputra Agro Persada dan pada PT. Sinar Mas Agro Tbk.

Jumlah pelayanan jasa BSPJI Samarinda sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Layanan Periode Triwulan I Tahun 2025

Jenis Layanan	Jan	Feb	Mar	Total Keseluruhan
Pengujian	167	443	212	822
Kalibrasi	0	6	5	11
Sertifikasi Produk	0	0	1	1
Pemeriksaan Halal	0	1	1	2
Pelatihan	0	0	0	0
Konsultasi	0	0	0	0
Verifikasi TKDN	0	2	0	2
Narasumber/Pengajar	0	1	2	3
Total Keseluruhan	167	453	221	841
% Capaian terhadap target	3,67%	9,97%	4,86%	18,50%

Berdasarkan data pada tabel diatas, Jumlah Layanan pada periode Triwulan I tahun 2025 mencapai 841 order dengan capaian sebesar 18,50% terhadap target 4.545 order.

b) Kendala

- Pada periode Triwulan I, secara keseluruhan layanan telah mencapai target order, namun pada layanan pelatihan dan konsultasi belum memiliki order pada periode ini. selain itu pada layanan sertifikasi produk, pemeriksa halal, verifikasi TKDN dan layanan

narasumber/pengajar juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan layanan pengujian dan kalibrasi.

- Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada kegiatan kunjungan dan peninjauan kerjasama karena merangkap dengan tugas dan kegiatan lainnya.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu adanya pengembangan layanan yang sehingga secara bertahap dapat membantu meningkatkan jumlah order layanan. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan pelayanan jasa kepada pelanggan

3) Indikator Kinerja 3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 20% dengan realisasi 20%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah :

- a. Penyusunan dan penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN periode Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2024 kepada BSKJI sesuai Nota Dinas tanggal 14 Januari 2025.
- b. Penyusunan dan penyampaian Laporan BMN periode Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2024 kepada Biro Keuangan Kementerian Perindustrian sesuai Nota Dinas tanggal 10 Februari 2025.
- c. Pada tahap awal proses penghapusan BMN, BSPJI Samarinda telah melakukan pendataan dan inventarisasi BMN yang sudah tidak layak pakai, rusak atau tidak lagi bisa digunakan untuk mendukung tugas pemerintahan. Setelah dilakukan pendataan, selanjutnya BSPJI Samarinda telah mengirimkan Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan kepada Sekretaris Jenderal pada tanggal 12 Maret 2025.
- d. Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN setiap bulannya selama Tahun 2025 kepada KPKNL Samarinda.

- e. Proses pengadaan alat laboratorium & pengolah data selama triwulan I dilakukan dengan tahapan survei harga pasar yang dilakukan untuk penentuan HPS, persiapan kelengkapan dokumen, pemesanan berupa alat laboratorium & pengolah data.
- f. Berdasarkan data selama Triwulan I 2025 (per 31 maret 2025) BSPJI Samarinda telah menerima total pendapatan sebesar Rp.961.425.766,-. Sedangkan untuk nilai aset milik BSPJI Samarinda per 31 Desember 2024 (unaudited) adalah sebesar Rp.39.246.794.908

Dari kegiatan yang telah dilakukan sepanjang Triwulan I, dilakukan perhitungan Nilai Revenue on Asset (RoA) dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Revenue on Asset (RoA)} &= (\text{PNBP Layanan Jasa} / \text{Total Nilai Aset}) \times 100\% \\ &= (961.425.766 / 39.246.794.908) \times 100\% = 2,45\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai RoA pada Triwulan I sebesar 2,45% dari target 8,10% atau tercapai sebesar 30,24%.

b) Kendala

Pada proses penghapusan BMN, perlu adanya surat persetujuan penghapusan BMN. Dalam triwulan I 2025, BSPJI Samarinda telah menyampaikan surat usulan persetujuan penghapusan BMN kepada Sekretaris Jenderal dan masih menunggu surat persetujuan penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal, sehingga belum dapat dilakukan koordinasi dengan KPKNL Samarinda. Pada proses pengadaan alat laboratorium & pengolah data, tidak dapat terlaksana tepat waktu dikarenakan barang yang akan dipesan dalam kondisi PO. Kondisi ini mempengaruhi kondisi Nilai Aset sepanjang Triwulan I.

c) Tindak Lanjut

Perlu dilakukannya monitoring secara berkala melalui aplikasi SIMAN V2 terkait surat persetujuan penjualan BMN yang akan dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

4) Indikator ke 4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 20 % dengan realisasi 20%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I meliputi:

- Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU
- Pengajuan pengesahan penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan, dengan perhitungan POBO sebagai berikut:

$$POBO = \frac{\text{Realisasi Pendapatan BLU}}{\text{Belanja Operasional BLU \& RM (kecuali Belanja Modal)}}$$

$$POBO = \frac{909.547.066}{3.021.980.448}$$

$$POBO = 30,10 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai POBO pada Triwulan I sebesar 30,10% dari target 41,50% atau telah tercapai sebesar 72,53%.

b) Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c) Tindak Lanjut

Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja secara tepat waktu setiap bulannya.

SK 3 : Terwujudnya SDM Profesional

Tabel 18. Capaian Kinerja SK 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
4	Terwujudnya SDM Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	82,96	-	-	25	25	B1: a) Membuat laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi TA. 2024 b) Identifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing Ketua Tim c) Perencanaan pelatihan pengadaan Barang/Jasa B2: a) Membuat program pelatihan tahun 2025 b) Pelaksanaan pelatihan bidang	B1: a) Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi TA. 2024. b) Penyampaian permohonan usulan kebutuhan pelatihan tahun 2025 kepada masing-masing ketua tim. c) Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi PBJP Lv-1 B2: a) Finalisasi Rencana Pengembangan Kompetensi (Pelatihan) Tahun 2025. b) Pelaksanaan In House Training Pengambilan Contoh Sampel Lingkungan, Mikrobiologi, dan Lingkungan Kerja.

								sertifikasi dan pengujian B3: a) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan I b) Revisi kegiatan pengembangan kompetensi	c) Pelaksanaan In House Training Pengujian Parameter Bromat pada AMDK. d) Pelaksanaan In House Training Pengujian Parameter pada Aneka Komoditi. B3: a) Penyampaian Kuesioner Evaluasi Personil yang telah mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi kepada ketua tim. b) Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi untuk Triwulan selanjutnya.
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indeks Profesionalitas ASN.

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 25% dengan realisasi 25%.

Pada triwulan I telah dilaksanakan pelatihan teknis melalui kegiatan in house training dan pelatihan eksternal yakni:

- Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 pada tanggal 22-23 Januari 2025 yang diikuti oleh 1 orang peserta
- In House Training Pengambilan Contoh Sampel Lingkungan, Mikrobiologi, dan Lingkungan Kerja pada tanggal 3-4 Februari 2025, yang diikuti oleh 24 orang peserta
- In House Training Pengujian Parameter Bromat pada AMDK pada tanggal 17-18 Februari 2025, yang diikuti oleh 6 orang peserta
- In House Training Pengujian Parameter pada Aneka Komoditi pada tanggal 25-26 Februari 2025, yang diikuti oleh 9 orang peserta

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian nilai IP ASN pada triwulan I berjalan dengan baik, dimana sampai akhir triwulan I realisasi dari target antara telah tercapai. Pencapaian ini

diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi berupa in house training dan pelatihan eksternal yang diikuti oleh pegawai.

Pada triwulan I belum diterima rekapitulasi capaian IP ASN dari Biro OSDM. Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan dan mencapai target fisik yang direncanakan di triwulan I.

b) Kendala

Pada pelaksanaan kegiatan, secara keseluruhan tidak ditemukan kendala yang menghambat pencapaian indikator kinerja. Pada triwulan I, mulai dari akhir Februari sampai Maret, bertepatan dengan bulan ramadhan sehingga beberapa kegiatan in house training ditunda untuk dilaksanakan. Selain itu, keterbatasan anggaran sebagai dampak dari efisiensi belanja turut menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan karena harus menunggu hasil revisi penetapan blokir belanja.

c) Tindak Lanjut

Dalam menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Hal ini juga dapat menjadi solusi agar kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dapat lebih merata keseluruh pegawai.

SK 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 19. Capaian Kinerja SK 4

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	25,00	125	15	15	B1: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA B2: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA B3: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	B1: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi B2: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi B3: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		Tingkat Penerapan SPBE	80,00			15		B1: Membuat data dukung LKE SPBE B2: Membuat data dukung LKE SPBE B3: Membuat data dukung LKE SPBE	B1: Menganalisis penjelasan 38 item LKE SPBE B2: Menganalisis penjelasan 38 item LKE SPBE B3: Mengikuti rapat Konsultasi Aplikasi SPBE pada hari Selasa, 18 Maret 2025
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	4,63	102,66	15	15	B1: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B2: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B3: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B1: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B2: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B3: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 15% dengan realisasi 15%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi dengan melakukan Identifikasi kebutuhan teknis Layanan Jasa Pengujian dan Kalibrasi yang akan dituangkan kedalam sistem aplikasi SILABISA.

Pada Periode Triwulan I Tahun 2025, BSPJI Samarinda memiliki 8 (delapan) Layanan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Layanan Jasa BSPJI Samarinda

No	Jenis Layanan	Data Terintegrasi Sistem Informasi BSKJI	Ket.
1.	Pengujian	v	Dalam proses integrasi data
2.	Kalibrasi	v	Dalam proses integrasi data
3.	Sertifikasi Produk	x	
4.	Pemeriksaan Halal	x	
5.	Pelatihan	x	
6.	Konsultansi	x	
7.	Verifikasi TKDN	x	
8.	Narasumber /Pengajar	x	
% Capaian		$= (2/8) \times 100\% = 25\%$	

Sampai akhri Triwulan I, sudah terdapat 2(dua) layanan yang sedang dalam proses integrasi data dengan sistem informasi BSKJI.

b) Kendala

- Integrasi data teknis cukup Kompleks sehingga butuh dilakukan penginputan dan penyesuaian data kembali pada sistem.
- Dibutuhkan adanya penyesuaian sumber daya tim pengembang dalam hal teknis laboratorium, khususnya kebutuhan teknis laboratorium dengan kemampuan teknis pemrograman.

c) Tindak Lanjut

Perlu dilakukan sinkronisasi data pada aplikasi SILABISA yang akan dilakukan integrasi dengan sistem Informasi BSKJI

2) Tingkat Penerapan SPBE

Penerapan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 15% dengan realisasi 15%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah melakukan analisis terhadap 38 item pada LKE SPBE untuk memperoleh gambaran tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda serta mengikuti rapat konsultasi dengan Pusdatin terkait Anggaran dan Aplikasi SPBE sehingga diperoleh pemahaman yang cukup sekaligus memperoleh data dukung yang diperlukan dalam rangka pemenuhan LKE SPBE. Adapun LKE SPBE adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Progres LKE SPBE

No.	Indikator IPS yang dinilai		Bobot	
1	TATA KELOLA SPBE			50%
	1	Reviu Arsitektur SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	6%	
	2	Reviu Peta Rencana SPBE Kemenperin telah dilaksanakan	6%	
	3	Konsultasi Rencana dan Anggaran SPBE dengan Pusdatin telah dilakukan	9%	
	4	Rencana dan Anggaran SPBE telah dikendalikan oleh Biro Perencanaan	11%	
	5	Reviu Rencana dan Anggaran SPBE telah dilaksanakan	5%	
	6	Dokumen model peta proses bisnis masing-masing level dan pendukung telah tersedia	4%	
	7	Dokumen model peta proses bisnis yang telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis telah tersedia	3%	
	8	Reviu inovasi proses bisnis telah dilaksanakan	3%	
	9	Proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada Pusdatin	9%	
	10	Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi	11%	
	11	Reviu pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan	6%	
	12	Reviu layanan Pusat Data Kemenperin dan Layanan Pusat Data Pemerintah	6%	
	13	Reviu layanan Jaringan Intra Kemenperin dan Jaringan Intra Pemerintah	6%	
	14	Reviu Sistem Penghubung Layanan Kemenperin dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	6%	
	15	Reviu tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Kemenperin	6%	
	16	Reviu pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan	3%	
2	MANAJEMEN SPBE			20%
	1	Reviu Manajemen Data SPBE telah dilaksanakan	20%	
	2	Reviu Manajemen Keamanan Informasi SPBE telah dilaksanakan	20%	
	3	Reviu Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan	10%	
	4	Reviu Manajemen Aset TIK (SPBE) telah dilaksanakan	10%	

No.	Indikator IPS yang dinilai		Bobot	
	5	Reviu Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah dilaksanakan	10%	
	6	Reviu Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan	10%	
	7	Reviu Manajemen Perubahan SPBE telah dilaksanakan	10%	
	8	Reviu Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan	10%	
3	LAYANAN SPBE			30%
	1	Reviu Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	7%	
	2	Reviu Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	6%	
	3	Reviu Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	7%	
	4	Reviu Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	6%	
	5	Reviu Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	6%	
	6	Reviu Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	6%	
	7	Reviu Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	7%	
	8	Reviu Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	6%	
	9	Reviu Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	7%	
	10	Reviu Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	7%	
	11	Reviu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	6%	
	12	Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	7%	
	13	Reviu Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilaksanakan	7%	
	14	Reviu Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik	15%	

b) Kendala

Pemenuhan data dukung LKE SPBE selain memerlukan proses konsultasi dengan Pusdatin dan Biro Perencanaan, hal ini merupakan tahapan yang baru bagi penanggung jawab SPBE di lingkungan BSPJI Samarinda, pada triwulan I tim kerja Pengembangan Jasa Industri sebagai penanggung jawab indikator SPBE masih terkendala kurangnya pemahaman tentang 38 item LKE SPBE dan serta tata cara pemenuhannya.

c) Tindak Lanjut

Mengikuti rapat konsultasi dengan Pusdatin terkait Anggaran dan Aplikasi SPBE secara rutin setiap bulan sehingga diperoleh pemahaman yang cukup sekaligus memperoleh data dukung yang diperlukan dalam rangka pemenuhan LKE SPBE.

3) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 15 % dengan realisasi 15%

Hasil perhitungan indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan I tahun 2025 diperoleh dari penilaian indikator berdasarkan pedoman Permenpan No.5 tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 22. Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,11	24%	0,99
2	Profesionalisme SDM	4,60	25%	1,15
3	Sarana dan Prasarana	5,00	18%	0,90
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	5,00	10%	0,50
6	Inovasi	4,50	12%	0,54
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4,63

Berdasarkan hasil penilaian pada Triwulan I, nilai Indeks Pelayanan Publik yang telah dicapai adalah 4,63. Nilai ini telah memenuhi kriteria kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”. Nilai tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 4,51 dengan capaian sebesar 102,66%.

b) Kendala

Adanya keterbatasan sumber daya termasuk kompetensi personel dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan dalam Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan nilai indeks pelayanan publik.

SK 5 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tabel 23. Capaian Kinerja SK 5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00			20	80	B1: Menyelesaikan seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan kegiatan TA. 2024 B2: Pengumpulan permintaan data dukung untuk keperluan Audit Kinerja Inspektorat B3: Koordinasi dengan tim auditor terkait jadwal rencana audit	B1: a) Penyelesaian bukti pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan tahun 2024 b) Audit kinerja oleh tim inspektorat tanggal 16-31 Januari 2025 B2: Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit oleh tim inspektorat B3: Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit oleh tim inspektorat
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98			20	20	B1: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide Primer, Skunder dan Tersier B2: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c) Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal B3: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melalui penerapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas	B1: a) Melakukan pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide primer, sekunder dan tersier B2: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c) Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal B3: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melalui penerapan srikandi c) Menginput daftar arsip aktif d) Menginput daftar isi berkas

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 25% dengan realisasi 80%.

Pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan audit kinerja oleh Tim Auditor Inspektorat III untuk kegiatan TA. 2024 berdasarkan Nota Dinas Nomor 16/IJ-IND.4/PW/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 dan Surat Tugas Nomor 10/IJ- IND/Sf/2025 tanggal 14 Januari 2025 dengan jumlah auditor sebanyak 3 (tiga) orang dan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari s.d 31 Januari 2025.

Pelaksanaan audit pada tahun ini menetapkan fokus pada pencapaian kinerja dan pengelolaan anggaran baik yang ditargetkan dalam Perjakin maupun target pada Kontrak Kinerja BLU. Dari hasil audit yang dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

- Lingkup Capaian Kinerja :
 - Kinerja layanan jasa tidak optimal;
 - Target dalam kontrak kinerja BLU tidak tercapai;
 - Informasi/data terkait capaian kinerja per layanan tidak valid;
 - Rencana aksi pemenuhan kinerja tidak terpenuhi;
 - Target kinerja tidak terpenuhi;
 - Output kegiatan tidak sesuai tujuan;
 - Penggunaan anggaran kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi tidak tepat peruntukannya
- Lingkup Pengelolaan Anggaran :
 - Output kegiatan tidak dapat dievaluasi secara memadai
 - Terdapat risiko pekerjaan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
 - BMN tidak terinventarisir dengan memadai
 - Pengadaan berisiko tidak efektif/ tidak sesuai kebutuhan

Adapun tindak lanjut dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 24. Progres Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal

No	Saran	Tindak Lanjut	Progres
1	Kepala BSPJI Samarinda agar: - Memberikan teguran tertulis kepada Kasubbag TU, PPK, Ketua Tim PJI dan koordinator kegiatan atas kekurang cermatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas penerimaan PNBP - Menginstruksikan Kasubbag TU dan petugas penyusun laporan kinerja, untuk berkoordinasi dengan Tim PJI dan serta Keuangan terkait pengumpulan data capaian kinerja layanan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan - Menginstruksikan Ketua Tim PJI untuk melakukan analisis terkait pemenuhan target kinerja capaian PNBP Layanan Jasa Industri, khususnya untuk layananjasa yang mengalami penurunan capaian (pengujian dan sertifikasi); - Menginstruksikan Ketua Tim PJI untuk menganalisis layanan jasa yang masih bersumber dari kontrak kerjasama dengan BSKJI (verifikasi/ fasilitasi TKDN), dan mendata potensial klien yang bisa melakukan pembiayaan layanan jasa secara mandiri - Menginstruksikan Ketua Tim PJI bersama Tim Kerja masing-masing layanan jasa teknis untuk menyusun roadmap pengembangan layanan jasa secara menyeluruh untuk tahun 2025.	- Telah diterbitkan nota dinas Kepala BSPJI Samarinda No.171/BSPJI-Samarinda/PW/11/2025 Tanggal 12 Februari 2025 perihal Instruksi dan Teguran Terkait Hasil Audit Kinerja TA. 2024 - Bukti Koordinasi ke semua ketua tim kerja terkait pengumpulan data untuk penyusunan laporan kinerja maupun laporan PP 39 yang dikompilasi melalui link Google Drive - Hasil analisis capaian kinerja layanan dari tim sertifikasi dan tim pengujian& kalibrasi	75%
2	Kepala BSPJI Samarinda agar: - Memberikan teguran tertulis kepada Kasubbag TU, PPK, Ketua Tim PJI dan koordinator kegiatan atas kekurang cermatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan; - Menginstruksikan Ketua Tim PJI dan koordinator kegiatan untuk menyampaikan kekurangan output laporan hasil kegiatan Capacity Building dan laporan pengelolaan media sosial periode Februari dan Maret 2024; - Menginstruksikan Kasubbag TU untuk menyusun prosedur/SOP penetapan prioritas penggunaan anggaran PNBP/BLU.	- Laporan Outbond TA. 2024 - Laporan media sosial bulan Februari 2024 - Laporan media sosial bulan Maret 2024 - SOP Penetapan Prioritas Penggunaan Anggaran PNBP/BLU No: 19 Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 - Surat Pernyataan dari TU, PPK, dan Ketua Tim atas teguran dari pimpinan	100%
3	Kepala BSPJI Samarinda agar: - Memberikan teguran tertulis kepada Ketua Tim PJI dan koordinator kegiatan atas kekurang cermatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang terkait pemenuhan target kinerja hasil layanan jasa industri; - Menginstruksikan kepada kepada Kasubbag TU, dan Ketua Tim PJI untuk berkoordinasi dengan BSKJI terkait penyusunan strategi dan kebijakan untuk mengendalikan pelaksanaan layanan jasa teknis antara UPT dengan kompetitor; - Menginstruksikan Ketua Tim PJI bersama Tim Kerja masing-masing layanan jasa teknis untuk menyusun roadmap pengembangan layanan, baik berupa perluasan ruang lingkup maupun penambahan layanan baru; - Menginstruksikan Ketua Tim PJI untuk melengkapi penjelasan dalam Laporan Kegiatan Penjajakan Kerjasama dan Kemitraan, serta menyampaikan laporan hasil kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024	- Laporan koordinasi pelaksanaan penjajakan kerjasama dan analisisnya - Penyampaian Nota Dinas ke Sekretaris BSKJI Nomor: 265/BSPJISamarinda/LP/111/2025 Tanggal 06 Maret 2025 perihal permohonan arahan terkait strategi untuk menghadapi kompetitor di pengujian lingkungan	60%

No	Saran	Tindak Lanjut	Progres
4	Kepala BSPJI Samarinda selaku KPA agar: a. Memberikan teguran tertulis kepada PPK atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. b. Menginstruksikan Kasubbag Tata Usaha untuk melakukan reviu terhadap SOP Pengadaan Barang dan Jasa dan menambahkan tahapan penyusunan, reviu dan penetapan spesifikasi teknis serta HPS. c. Menginstruksikan kepada penanggungjawab pengembangan sistem informasi untuk melakukan reviu dan revisi terhadap roadmap pengembangan SIL dengan menyesuaikan pada perkembangan trend layanan terkini.	SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa No. SOP/BSPJI-SMD.1/10.1	50%
5	Kepala BSPJI Samarinda selaku KPA: a. Menginstruksikan kepada Petugas BMN untuk menyusun BAST/SAPP untuk BMN hasil pengadaan untuk penggunaan personal. b. Menginstruksikan kepada Petugas BMN untuk memberi koding pada BMN laptop ASUS tersebut.	1. Telah dibuat BAST Penyerahan BMN untuk kendaraan dinas dan pengolah data laptop. 2. Bukti koding untuk pengadaan Laptop	100%
6	Kepala BSPJI Samarinda selaku KPA agar menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh Kordinator kegiatan agar menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan BMN dalam setiap kebutuhan pengadaan sesuai dengan SOP	Formulir usulan permintaan barang/alat TA. 2025 dari ketua tim kerja/ Ka. TU	90%

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam pemenuhan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.

c) Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan tim APIP secara berkelanjutan apabila dirasakan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan di keuangan.

2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 20 % dengan realisasi 20%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah:

1. Kegiatan pengelolaan pengadministrasian naskah dinas masuk internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi SRIKANDI

Tabel 25. Naskah Dinas Masuk pada SRIKANDI (Januari – Maret 2025)

No	Kegiatan	Bulan	Jumlah Naskah Dinas	Keterangan
1	Presentase pengelolaan pengadministrasian naskah dinas melalui penerapan aplikasi SRIKANDI	Januari	90 Naskah Dinas Masuk	Aplikasi SRIKANDI
		Februari	77 Naskah Dinas Masuk	Aplikasi SRIKANDI
		Maret	50 Naskah Dinas Masuk	Aplikasi SRIKANDI

2. Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan

Tabel 26. Seleksi Arsip Inaktif Musnah

Kode	Uraian Informasi Berkas	Kurun Waktu	Jumlah	Retensi		Hasil Akhir
				Aktif	Inaktif	
MS.08	STU 2020	Januari – Maret 2020	2518 STU (5 box)	1 thn	2 thn	Musnah

3. Pembuatan daftar berkas arsip usul musnah

Tabel 27. Seleksi Arsip Inaktif Musnah

Kode	Uraian Informasi Berkas	Kurun Waktu	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Hasil Akhir
MS.08	STU 2020	Januari – Maret 2020	2518 STU (5 box)	Asli/Copy	Musnah

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

c) Tindak Lanjut

Monitoring berkala untuk kegiatan pada bulan berikutnya

SK 6 : Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi

Tabel 28. Capaian Kinerja SK 6

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45			25	30	B1: a) Penyelesaian dan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja 2024 b) Penyusunan Revisi RSB 2023-2027 c) Rapat Kerja 2025 B2: a) Kick Off Pelaksanaan Kegiatan TA. 2025 b) Penyusunan Renkin TA. 2026 c) Evaluasi SAKIP TA. 2024 B3: a) Pengumpulan usulan KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 1 c) Pelaporan Monev BAPPENAS	B1: a) Penyusunan dan penyampaian LAKIP TA. 2024 b) Penyusunan dan penyampaian Revisi RSB c) Pelaksanaan Rapat Kerja TA. 2025 pada tanggal 17 Januari 2025 d) Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja e) Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 f) Penyusunan Renkin 2026 f) Proses penyiapan data dukung penilaian SAKIP B2: a)Penyiapan data dukung penilaian SAKIP B3: a) Pelaksanaan Penilaian SAKIP TA. 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									b) Pelaksanaan Kick Off Meeting 2025 pada tanggal 24 Maret 2025. c) Penyampaian Nota Dinas terkait Usulan Anggaran dan Kegiatan TA. 2026 d) Persiapan Pelaporan Triwulan I.
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	100	106,17	24	24	B1: a) Revisi DIPA awal dan Pencantuman Saldo Awal b) Penyusunan Rencana Belanja per Kegiatan (Sub Komponen) c) Pengajuan UP d) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Januari B2: a) Penyusunan RPD (maks 10 Februari) b) Pelaporan CAPUT Januari c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Februari d) Pengajuan GUP Februari B3: a) Pelaporan CAPUT Februari b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Maret c) Pengajuan GUP Maret d) Monev Penyerapan Anggaran TW 1	B1: a) Pelaksanaan Revisi DIPA dan Pencantuman Saldo Awal yang ditetapkan pada Revisi DIPA 1 tanggal 30 Januari 2025. b) Pelaksanaan belanja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. c) Pengajuan UP dilakukan pada tanggal 31 Januari 2025 dengan No. SP2D 250461301000851 tanggal 7 Februari 2025 d)Pengesahan dilakukan tanggal 31 Januari 2025. B2: a) Pelaksanaan Revisi DIPA dalam rangka <i>tagging</i> blokir dan Pemutakhiran Hal III (RPD) b) Permintaan data Laporan Caput c) Pengesahan Penerimaan Belanja dan Pendapatan yang dilakukan tanggal 25 Februari 2025 B3: a) Pelaporan Caput ke KPPN b) Pengesahan Belanja dan Pendapatan yang dilakukan tanggal 27 Maret 2025 c) Pengajuan UP Nihil pada tanggal 6 Maret 2025 d) Monev realisasi belanja Triwulan I

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 25% dengan realisasi 30%.

Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 14 Maret 2025. Dokumen yang disiapkan dalam rangka penilaian SAKIP BSPJI Samarinda telah diupload pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1ohSSeAY-A0-a00Pj9GNhurJPjK2FV2zg?usp=drive_link.

Dokumen SAKIP BSPJI Samarinda terdiri dari dokumen :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Kinerja

Tim APIP yang bertugas melaksanakan penilaian pada dokumen SAKIP BSPJI Samarinda adalah Paramitha Susilo Budi Utari. Rekomendasi/ masukan tim APIP untuk peningkatan implementasi SAKIP di BSPJI Samarinda antara lain :

- Capaian kinerja BSPJI Samarinda telah tercapai pada 12 (dua belas) indikator, sedangkan 3 (tiga) indikator belum tercapai sesuai target yakni Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dan Nilai minimal laporan keuangan.
- Seluruh Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 telah ditindaklanjuti.
- Upaya BSPJI Samarinda yang dapat dipertimbangkan dalam peningkatan hasil penilaian SAKIP antara lain:

- Telah mengupayakan pengembangan sistem informasi untuk pengumpulan data, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dapat digunakan dalam monitoring evaluasi setiap bulan.
- Telah menyusun matriks Crosscutting, dimana satker lain pada umumnya hanya menggunakan matriks dari BSKJI.
- Telah terdapat strategi dan kebijakan terkait efisiensi yang mempengaruhi peningkatan ketercapaian indikator kinerja “Meningkatnya PNPB layanan jasa industri” melalui penetapan besaran uang harian tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan.
- Telah melakukan upaya peningkatan budaya kerja bagi pegawai melalui sosialisasi budaya “BERAKHLAK” sebagai dampak dari hasil pengukuran kinerja khususnya pada indikator “Rata-rata indeks profesionalitas ASN”.
- Telah memanfaatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja TA. 2024 dengan disampaikan kepada seluruh pegawai melalui “Knowledge Management” di intranet dalam rangka peningkatan awareness terhadap pencapaian Kinerja.

Berdasarkan hasil pendalaman Tim penilai 2, implementasi SAKIP BSPJI Samarinda TA. 2024 telah mengalami peningkatan dibandingkan hasil evaluasi tahun 2023. BSPJI Samarinda memperoleh nilai 85,40 dengan Predikat A. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP tahun 2025, dilakukan langkah-langkah sesuai kerangka LKE sebagai berikut:

Tabel 29. Langkah-langkah pemenuhan LKE AKIP Triwulan I TA. 2025

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
1	Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	SOP Penyusunan Renstra, Renkin, Perjakin, TPNBP, RKAKL
			2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	Rencana Kinerja 2025, Rencana Kerja 2025
			4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Perjanjian Kinerja 2025
			5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Rencana Aksi 2025
			6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Draft Renstra, Renkin, Perjakin, TPNBP
		2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik,	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	Seluruh dokumen perencanaan telah ditandatangani pimpinan dan diberi stempel

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
		yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan di website
			3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra BSKJI
			6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode Perencanaan Strategis).	Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra BSKJI
			7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	Target kinerja ditetapkan sesuai dengan histori pencapaian periode sebelumnya
			8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Cascading SKP dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai dalam bentuk Matrik Peran Hasil
			9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan Crosscutting).	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Penyusunan SKP seluruh pegawai
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.		1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	Rencana Aksi 2025
			3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	Pengukuran Rencana Aksi per bulan, Pelaporan Rencana Aksi per triwulan
			5. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Revisi SOP, Reviu Renstra, Revisi DIPA.
			6. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.	Revisi SOP, Reviu Renstra, Revisi DIPA.
			7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Belum ditindaklanjuti di TW 1

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
			8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	SKP Seluruh pegawai, Rapat Kick Off yang dihadiri seluruh pegawai
2.	Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	SOP Pengumpulan Data Kinerja
			2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Pedoman Kinerja di dalam Renstra
			3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	SOP Pengumpulan Data Kinerja
		2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara fektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja dan Rapat Kick Off
			4. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			5. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			6. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	Pengukuran kinerja TW 1 melalui SILABISA
			7. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	SKP Per Triwulan, Laporan PP 39 per Triwulan
			8. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Pedoman Pengukuran Kinerja SILABISA
			9. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Pedoman Pengukuran Kinerja SILABISA
		3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	1. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan.	Rekap Belanja Pegawai
			2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi enyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
				pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	Nota Dinas Penyampaian efisiensi anggaran
			8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Nota Dinas Penyampaian efisiensi anggaran
			9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Dokumentasi Rapat Kerja, Rapat Kick Off dihadiri ketua tim dan/ atau seluruh pegawai yang memuat hasil pengukuran kinerja
			10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Bahan Rapat Rapat Kick Off di sampaikan kepada seluruh pegawai melalui WA Grup.
3.	Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
		2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.	1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Belum ditindaklanjuti di TW 1

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
		Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Evaluasi.	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal.	Keputusan Menteri Perindustrian No. 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
			2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
		2. Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Pemenuhan dokumen untuk evaluasi AKIP ditugaskan kepada bagian Program di Sub bagian Tata Usaha
			3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1
			5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Belum ditindaklanjuti di TW 1
		3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti.	Belum ditindaklanjuti di TW 1, masih menunggu hasil LHE dari Itjen.
			2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal.	Belum ditindaklanjuti di TW 1, masih menunggu hasil LHE dari Itjen.

No	Komponen	Sub Komponen	Kriteria	Kegiatan yang dilaksanakan/ Dokumen yang disusun
		yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Perbaikan sementara dilakukan berdasarkan masukan tim penilai saat penilaian SAKIP.
			4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Belum ditindaklanjuti di TW 1, masih menunggu hasil LHE dari Itjen.
			5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi AKIP internal.	Belum ditindaklanjuti di TW 1, masih menunggu hasil LHE dari Itjen.

b) Kendala

Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah diupayakan dengan maksimal.

c) Tindak Lanjut

Pada Triwulan ini telah diperoleh penilaian atas SAKIP TA. 2024 yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini akan menjadi standar baru yang mendorong peningkatan kualitas dalam pelaksanaan kinerja di tahun ini. Hal ini menjadi perhatian agar pada tahun ini, seluruh perbaikan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya agar tetap dijalankan serta setiap catatan atas pelaksanaan kinerja ditahun sebelumnya dapat ditindak lanjuti dengan baik sehingga pada penilaian selanjutnya dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 24% dengan realisasi 24%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I meliputi pelaksanaan Revisi DIPA dan Pemutakhiran Hal III DIPA (RPD), pelaksanaan belanja dalam kegiatan, pengajuan UP, pengesahan belanja dan penerimaan, pelaporan Capaian Output, pengajuan GUP, serta monitoring penyerapan anggaran. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, diperoleh Nilai IKPA pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Rekapitulasi IKPA Triwulan I

Bulan	Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Jan	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00	60%	0,00	100,00
	Nilai Akhir	10,00	15,00	0,00	10,00	0,00	0,00	25,00				
Feb	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70%	0,00	100,00
	Nilai Akhir	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00	0,00	25,00				
Mar	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70%	0,00	100,00
	Nilai Akhir	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00	0,00	25,00				

Dari tabel diatas, diperoleh capaian nilai IKPA Triwulan I sebesar 100 dari target sebesar 94,18.

b) Kendala

Pada Triwulan I, pelaksanaan anggaran tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat akibat menunggu selesainya proses *tagging* blokir melalui Revisi DIPA dengan kewenangan DJA. Oleh karena itu, melalui surat Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur No. S-222/WPB.20/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, disampaikan penyesuaian terkait ketentuan penilaian IKPA dengan memberikan nilai 100 pada seluruh indikator IKPA Triwulan I 2025.

c) Tindak Lanjut

Pada Triwulan selanjutnya, setelah proses *tagging* blokir belanja telah selesai maka pelaksanaan anggaran akan berjalan dengan normal dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pencapaian setiap aspek dalam penilaian IKPA.

SK 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Tabel 31. Capaian Kinerja SK 7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	80,00	28,69	36%	20	20	B1: Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP B2: Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE B2: a) Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia	B1: Pelaksanaan Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP B2: Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE B3: a) Proses persiapan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Proses Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia c) Penginputan data Tingkat Penggunaan Komponen Dalam Negeri melalui belanja barang/jasa sesuai akun terpilih dari anggaran Rupiah Murni

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Capaian pengadaan barang/jasa yang menggunakan komponen produk dalam negeri sampai akhir Triwulan I (rekap data per 24 Maret 2025) dari target sebesar 20% telah terealisasi sebesar 20%.

Adapun rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemenuhan dan updating data perencanaan B/J pada sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Merujuk pada pagu total BSPJI Samarinda sebesar Rp 19.656.486.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 8.218.073.000, Belanja Barang Rp 8.679.913.000 dan Belanja Modal Rp 2.758.500.000, maka jumlah pagu paket pengadaan yang bersumber dari belanja barang dan belanja modal telah diumumkan adalah adalah Rp 11.438.413.000. Berdasarkan hal tersebut, paket pengadaan yang telah diumumkan pada SIRUP telah mencapai 100%.

2. Penginputan data Tingkat Penggunaan Komponen Dalam Negeri melalui belanja barang/jasa sesuai akun terpilih dari anggaran Rupiah Murni.

Komponen Dalam Negeri melalui belanja barang/jasa sesuai dihitung melalui akun dari anggaran Rupiah Murni dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Akun	Kegiatan
1	521211	Belanja Bahan
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3	521811	Belanja barang Persediaan
4	522192	Belanja Jasa Lainnya
5	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
6	521111	Belanja Keperluan Perkantoran
7	521131	Tidak terdapat pada DIPA 2024
8	522141	Belanja Sewa
9	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
10	522131	Belanja Jasa Konsultan
11	522191	Belanja Jasa Lainnya
12	521241	Tidak terdapat pada DIPA 2024
13	521841	Tidak terdapat pada DIPA 2024
14	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Dari 15 akun terpilih tersebut sampai triwulan I ini baru terdapat 5 akun belanja yang terdapat dalam DIPA BSPJI Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Pagu	Realisasi P3DN	Impor	% RP3DN
1	521111	30.917.000	25.000.000	-	80,86
2	521211	2.000.000	0	-	0
3	521811	3.000.000	0	-	0
4	522131	0	0	-	0
5	522191	122.160.000	20.360.000	-	16,67
	Total	158.077.000	45.360.000	0	28,69

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sampai Triwulan I sebesar 28,69%.

3. Pelaporan revid realisasi pengadaan barang/ jasa sampai pada triwulan I.

Revid terhadap realisasi pengadaan barang/ jasa berdasarkan pada triwulan I berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Laporan ALKI yaitu sebagai berikut :

Terdapat paket pengadaan sebanyak 128 paket dengan total pagu Rp. 11.438.413.000, yang terdiri dari 63 paket penyedia dengan total nilai pagu sebesar Rp. 6.403.376.000, terdapat belanja modal sebanyak 10 paket dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.758.500.000 serta terdapat 65 paket penyedia swakelola dengan pagu sebesar Rp. 5.035.037.000,-

b) Kendala

Masih minimnya realisasi persentase penggunaan produk dalam negeri, yang disebabkan perhitungan persentase hanya diambil berdasarkan 15 akun terpilih yang bersumber dari Rupiah Murni.

c) Tindak Lanjut

Melakukan monitoring secara berkala setiap bulannya terhadap realisasi pengadaan barang/jasa.

3.3.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Kegiatan pada Triwulan I TA 2025 (Januari-Maret) terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan I Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Maret	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret	
								RVRO	Prog.	RVRO	Prog.	RVRO	Prog.
AEC Kerja sama	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899	126,754	9.80%	5	4	21.0%	1	5.0%	2	8.0%	1	8.0%
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133	251,340	14.40%	500	145	24.0%	45	8.0%	55	8.0%	45	8.0%
BAD Pelayanan Publik kepada industri	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,518,360	1,518,360	4.20%	300	126	20.5%	47	5.0%	55	7.0%	24	8.5%
	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	168,664	168,664	0%	29	1	20.0%	0	10.0 %	1	5.0%	0	5.0%
	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955	392,393	7.80%	44	3	15.0%	0	5.0%	1	5.0%	2	5.0%
	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472	184,472	1.30%	13	2	6.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522	320,522	0.80%	10	1	5.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	1.0%
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan	2,007,500	1,185,786	0%	59	0	9.0%	0	2.0%	0	2.0%	0	5.0%
Total	Target Keuangan: 22.34%	5,465,505	4,148,291	3.6%									

1) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. AEC. Kerja sama

Pada Triwulan I, realisasi kegiatan kerjasama dilaksanakan melalui perjalanan dinas dalam rangka penjajakan kerja sama dengan industri ataupun perusahaan yang akan melakukan kerja sama dengan BSPJI Samarinda seperti PT. Sinar Mas Agro Tbk, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Kartanegara dan PT. Triputra Agro Persada.

b. AEF. Sosialisasi dan Diseminasi

Pada KRO ini terdiri dari sub komponen Temu Pelanggan, Pameran, Webinar, Promosi dan Pemasaran Layanan, serta Unit Pelayanan Publik. Dalam rangka efisiensi belanja, pagu belanja dalam KRO ini sebagian besar diblokir dan menyisakan pagu hanya untuk mendukung

kegiatan Promosi dan Pemasaran Layanan serta Unit Pelayanan Publik. Pada Triwulan I, realiasi kegiatan dilaksanakan melalui belanja barang yang berupa pencetakan *bookled* serta pembuatan *souvenir* yang diperlukan dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran layanan ke industri/perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna jasa layanan BSPJI Samarinda.

c. BAD. Pelayanan Publik kepada industri

Pada KRO ini terdiri dari Rincian Output yang mendukung pelaksanaan layanan jasa teknis yakni Layanan Pengujian, Layanan Kalibrasi, Layanan Sertifikasi, serta Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri. Adapun realiasi pada KRO ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan layanan-layanan jasa sepanjang triwulan ini.

d. BDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri

Pada Triwulan I, realisasi kegiatan pada KRO ini dilaksanakan melalui pelaksanaan layanan Konsultasi dan Pembinaan Industri.

e. CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan selama triwulan ini belum ada realisasi.

2) Kendala

Pada triwulan ini, adapun target yang ditetapkan oleh BSKJI adalah realisasi keuangan sebesar 22.34% dan capaian realisasi keuangan hanya sebesar 3,6%. Berdasarkan capaian BSPJI Samarinda di triwulan I ini seluruh KRO pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri pada yang belum memenuhi target. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini adalah karena adanya efisiensi belanja pemerintah sehingga setiap instansi melakukan blokir anggaran sesuai dengan jumlah yang disampaikan. Adapun proses revisi blokir anggaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kegiatan-kegiatan tidak dapat berjalan hingga DIPA ditetapkan.

3) Rekomendasi

Dalam menindaklanjuti kondisi efisiensi belanja, BSPJI Samarinda telah melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan melalui BSKJI, serta pihak Kementerian Keuangan (DJA dan Kanwil DJPB Kalimantan Timur) selama proses revisi dan penetapan anggaran setelah dilakukannya blokir. Selain itu, BSPJI Samarinda juga telah menyusun skala prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya, sehingga kegiatan yang paling krusial seperti layanan jasa tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Selama Triwulan I, juga diupayakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak diblokir sehingga pencapaian realisasi fisik tetap berjalan sambil menunggu penetapan DIPA.

b. Kegiatan II Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Maret	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret	
								RVRO	Prog.	RVRO	Prog.	RVRO	Prog.
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000	150.000	0%	1	0	19.5%	0	8.5%	0	9.0%	0	2.0%
	Layanan Perkantoran	12,626,995	11,699,907	31.60%	1	0	25.5%	0	8.5%	0	9.0%	0	8.0%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	621.000	238,374	0%	37	0	18.0%	0	6.0%	0	7.0%	0	5.0%
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806	292,986	11.70%	52	24	20.0%	0	0.0%	24	20.0%	0	0.0%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370	-	0%	1	0	20.0%	0	8.0%	0	8.0%	0	4.0%
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110	-	0%	1	0	20.0%	0	8.0%	0	8.0%	0	4.0%
	Layanan Manajemen Keuangan	75,500	-	0%	2	1	20.0%	0	8.0%	1	8.0%	0	4.0%
	Layanan Reformasi Kinerja	21,580	21,58	0%	1	0	20.0%	0	7.0%	0	5.0%	0	8.0%
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4,620	4,620	0%	1	0	20.0%	0	8.0%	0	8.0%	0	4.0%
Total	Target Keuangan: 22.34%	14,190,981	12,407,467	30.3%									

1) Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO ini terdiri dari RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta RO Layanan Perkantoran. Pada Triwulan I, pada RO Layanan Hubungan Masyarakat belum ada realisasi. Sementara pad RO Layanan Perkantoran telah menunjukan realisasi yang baik. Adapun Layanan Perkantoran meliputi pelaksanaan pembayaran gaji serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, yang sepanjang Triwulan I dapat diupayakan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal rutin.

b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal selama triwulan ini belum ada realisasi.

c. Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi Layanan Manajemen SDM Internal diperoleh melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan In House Training yang dilaksanakan sepanjang triwulan ini. Adapun Kegiatan Peningkatan Potensi SDM tidak dapat dilaksanakan karena seluruh pagu belanja diblokir.

d. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Adapun RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan seluruh pagu belanjanya diblokir. Sementara untuk RO Layanan Reformasi Kinerja dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, selama Triwulan I belum ada realisasi.

2) Kendala

Pada triwulan ini, adapun target yang ditetapkan oleh BSKJI adalah realisasi keuangan sebesar 22.34% dan capaian realisasi keuangan mencapai 30,3%. Berdasarkan capaian BSPJI Samarinda di triwulan I ini seluruh KRO pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri pada yang telah memenuhi target. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini secara garis besar sama seperti pada kegiatan sebelumnya. Namun, dikarenakan kegiatan yang ada merupakan kegiatan rutin yang memang harus direalisasikan seperti pembayaran gaji dan honor, pembayaran langganan daya dan jasa, serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, maka realisasi keuangan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri lebih baik daripada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri.

3) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah capaian realisasi keuangan dapat lebih dioptimalkan di triwulan selanjutnya mengingat bahwa proses blokir belanja dan revisi DIPA telah selesai. Rencana perbaikan di periode selanjutnya adalah mengupayakan pelaksanaan kegiatan yang sempat tertunda di triwulan I serta melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan per triwulannya. Selanjutnya juga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk mendorong capaian triwulan berikutnya.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Hambatan dan Kendala pada Pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada Triwulan I 2025 lebih kepada proses penetapan Indikator Kinerja yang lama serta belum jelasnya beberapa definisi operasional dan cara perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja. Selain itu, adanya beberapa Indikator Kinerja yang baru juga membutuhkan proses pemahaman dari masing-masing penanggungjawab dalam mengerjakan dan mencapai target yang ditetapkan dari Indikator Kinerja baru tersebut. Oleh karena itu, sampai Triwulan I berakhir, pada Indikator Kinerja Baru belum menunjukkan proses pencapaian target yang baik dibandingkan dengan Indikator Kinerja yang sudah ada dari tahun sebelumnya.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Dalam menindaklanjuti kondisi proses penetapan Indikator Kinerja yang lama, maka pada Triwulan selanjutnya perlu dilakukan percepatan pencapaian rencana aksi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang dapat mendukung tercapainya realisasi kegiatan terutama pada indikator-indikator kinerja baru. Selanjutnya, perlu dilakukan pengawasan pada indikator kinerja yang pada tahun sebelumnya telah ada dan saat ini telah menunjukkan pergerakan dalam pencapaian target sepanjang Triwulan I sehingga dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik dan memaksimalkan bagian yang masih dapat ditingkatkan sehingga capaian tetap terjaga bahkan dapat meningkat lagi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Relisasi Kegiatan

Capaian Kinerja triwulan I menunjukkan progres realisasi fisik dari pemenuhan target Perjakin mencapai 25,41% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi sebesar 22%. Selain itu, persentase realisasi keuangan berdasarkan Sistem Informasi Keuangan (Intranew) berbasis Akrual terhadap Pagu Efektif sebesar 23,4%, sementara persentase realisasi keuangan berdasarkan Ompan terhadap Pagu Efektif sebesar 18,25%. Adapun capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan BSKJI, dimana target untuk kinerja keuangan sebesar 22,34% dan target untuk kinerja fisik sebesar 25%.

Selama periode Triwulan I ini, untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui efisiensi anggaran, juga telah dilakukan telah dilakukan 2 kali revisi DIPA kewenangan DJA dan 4 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Selanjutnya, sampai akhir triwulan ini dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ada, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang telah mendapatkan hasil capaian yang memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, yakni:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
4. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pelaksanaan Kinerja per Kegiatan pada triwulan ini, masih terdapat beberapa KRO belum mencapai target realisasi fisik maupun keuangan yang ditetapkan oleh BSKJI. Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan masih mencapai nilai 3,6% dan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri telah melebihi target yakni sebesar 30,3% (Sistem Informasi Keuangan).

4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Kendala yang memberi pengaruh cukup besar kepada kinerja secara keseluruhan adalah penetapan revisi anggaran hasil efisiensi dan penetapan blokir belanja yang membutuhkan waktu yang cukup lama diawal tahun sehingga beberapa kegiatan belum dijalankan mengingat ada beberapa detail belanja yang diblokir. Selain itu, diawal tahun juga banyak kegiatan dari eksternal balai seperti audit kinerja yang membuat beberapa pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda karena fokus dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan saat audit kinerja. Selanjutnya, proses penetapan Indikator Kinerja yang cukup lama sebagai akibat belum finalnya Dokumen Renstra 2025-2029 juga turut menghambat kinerja disepanjang Triwulan I.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah perlu dilakukan optimalisasi aktifitas yang mendukung pencapaian target keuangan dan layanan jasa yang sebelumnya tertunda dan tidak tercapai. Selain itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antar tim kerja untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pencapaiannya membutuhkan peran dari masing-masing tim kerja.

Demikian laporan triwulan I tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi Badan standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, maupun pihak terkait.

LAMPIRAN

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN I TA. 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	3,82	104,37	24%	24%	B1	a. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b. Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c. Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B1	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b. Pemantauan pengaduan pelanggan	1. Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa. 2. Adanya keterbatasan petugas dalam memonitoring pengguna jasa apakah telah melakukan survey secara konvensional pada layanan selain jasa pengujian karena sifat pengisiannya sukarela. 3. Kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survey kepuasan masyarakat dan keterbatasan SDM responden dalam melakukan survey. 4. Beberapa responden memberikan penilaian survey kurang baik karena hasil uji sample pada layanan pengujian tidak sesuai harapan pengguna jasa	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan pengisian responden pada layanan kalibrasi, pelatihan, konsultasi dan sertifikasi. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah tersedianya sistem survey terhadap seluruh jenis pelayanan melalui sistem informasi serta dilakukan sosialisasi pentingnya survey kepuasan masyarakat melalui sosial media, serta himbauan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan jumlah responden.	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II-IV
		B2	a. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b. Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c. Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B2	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b. Pemantauan pengaduan pelanggan												
		TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	210	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	91	43%	25%	25%	B1	a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b. Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA	B1	a. Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b. Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi; c. Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi seperti unsur hara pada jaringan tanaman	Pada periode Triwulan I capaian jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri sudah cukup baik, namun belum terdapat order pelatihan dan konsultasi.	Diperlukan kerjasama dari semua pihak baik dari tim layanan maupun tim pemasaran dalam memasarkan layanan jasa ke pelanggan yang potensial sehingga industri yang dilayani mengalami peningkatan selain itu diperlukan	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri. Tim	Triwulan II-IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										c. Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d. Penyusunan jadwal audit perusahaan dan pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal serta Sertifikasi produk	d. Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e. Meningkatkan kualitas Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga dalam rangka penajajakan kerjasama		penambahan jumlah parameter layanan yang terakreditasi.	Kerja Pengembangan Jasa Industri	
										B2 a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b. Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d. Pelaksanaan layanan Verifikasi dan Pembinaan SDM Industri e. Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	B2 a. Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b. Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi; c. Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi seperti unsur hara pada jaringan tanaman d. Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e. Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga dalam rangka penajajakan kerjasama				
										B3 a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b. Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta	B3 a. Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b. Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi; c. Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi seperti unsur hara pada jaringan tanaman d. Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
											melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d. Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Pembinaan SDM Industri e. Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		e. Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga dalam rangka peninjakan kerjasama				
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86	Persen	98,07	114,03	25%	25%	B1	a. Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b. Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c. Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B1	Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia dan pemeliharaan peralatan	Kendala yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target kedepannya adalah pada pengadaan bahan kimia untuk pengujian mikrobiologi yang masih indent sehingga nantinya dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelayanannya. Dalam pencapaian target ketepatan waktu sampel di kegiatan pengujian dan kalibrasi diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan juga perencanaan yang lebih matang dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, penjadwalan sampling serta kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.	Dalam menindaklanjuti kondisi pengadaan bahan kimia untuk Laboratorium Mikrobiologi, tim laboratorium akan mengupayakan pemesanan bahan kimia di awal serta mencoba metode pengujian alternatif yang sesuai dengan metode yang lama. Selanjutnya, Diperlukan kerjasama dari semua tim kerja dalam pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis dalam pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan juga perencanaan yang lebih matang dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, penjadwalan sampling serta kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi	Triwulan IV
										B2	a. Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b. Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c. Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B2	Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia dan pemeliharaan peralatan				
										B3	a. Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b. Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c. Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B3	Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia dan pemeliharaan peralatan				
		SK.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	6	Nilai			24%	24%	B1	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun	B1	a. Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung	Pelaksanaan survei Net Promotore Score (NPS) masih dilakukan secara	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah iumlah	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
											promosi layanan melalui media sosial		maupun promosi layanan melalui media sosial b. Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)	manual sehingga jumlah responden belum maksimal	responden yang mengikuti survei NPS masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA		
								B2	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B2	a. Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b. Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)						
								B3	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B3	a. Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b. Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)						
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	Persen			25%	25%	B1	a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b. Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c. Pelaksanaan layanan jasa industri d. Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	B1	a. Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultansi industri. b. Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi SILABISA c. Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup d. Promosi dan Kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan	Target PNBP pada Triwulan I telah mencapai target namun belum mencakup pada semua layanan jasa misalnya pada layanan jasa pelatihan belum mendapatkan pendapatan pada Triwulan I. Selain itu, pada layanan sertifikasi dan halal, permohonan dari pelanggan untuk layanan masih kurang serta keberadaan industri yang wajib SNI di Kaltim jumlahnya masih terbatas. Sedangkan jika dilihat pada periode bulan Maret, penerimaan PNBP hanya mengandalkan dari Layanan Jasa Pengujian dan Transportasi dan Akomodasi.	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu ditingkatkan lagi proporsi pendapatan layanan jasa lain selain Jasa Pengujian. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan peningkatan promosi layanan Jasa Lainnya selain Layanan Jasa Pengujian.	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II-IV
								B2	a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b. Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c. Pelaksanaan layanan jasa industri d. Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	B2	a. Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultansi industri. b. Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi SILABISA c. Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup d. Promosi dan Kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan						

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										B3 a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b. Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c. Pelaksanaan layanan jasa industri d. Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	B3 a. Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b. Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak pada aplikasi SILABISA c. Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi diluar lingkup d. Promosi dan Kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan				
		SK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	4545	Hasil Layanan			25%	25%	B1 a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b. Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c. Pelaksanaan layanan jasa industri d. Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B1 a. Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi silabisa b. Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c. Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan Promosi sosial media	Pada periode Triwulan I, secara keseluruhan layanan telah mencapai target order, namun pada layanan pelatihan dan konsultasi belum memiliki order pada periode ini. selain itu pada layanan sertifikasi produk, pemeriksa halal, verifikasi TKDN dan layanan narasumber/pengajar juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan layanan pengujian dan kalibrasi. § Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada kegiatan kunjungan dan penjajakan kerjasama karena merangkap dengan tugas dan kegiatan lainnya.	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu adanya pengembangan layanan yang sehingga secara bertahap dapat membantu meningkatkan jumlah order layanan. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan pelayanan jasa kepada pelanggan	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II-IV
								B2 a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b. Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c. Pelaksanaan layanan jasa industri d. Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B2 a. Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi silabisa b. Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c. Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan Promosi sosial media						
								B3 a. Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b. Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c. Pelaksanaan layanan jasa industri	B2 a. Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi silabisa b. Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c. Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan Promosi sosial media						

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I						Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana		Realisasi					
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
											d. Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA						
		SK.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,1	Persen	2,45	30,24	20%	20%	B1	a. Penyampaian Laporan b. Pengawasan BMN untuk TA. 2024 c. Penyiapan konsep laporan BMN d. Inventarisasi BMN yang akan diusulkan penghapusan	B1	a. Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 TA 2024 kepada BSKJI pada tanggal 14 Januari 2025. b. Menyiapkan konsep Laporan BMN Semester 2 dan Tahunan untuk TA 2024. c. Melakukan Inventarisasi dan pendataan BMN yang akan diusulkan penghapusan.	Pada proses penghapusan BMN, perlu adanya surat persetujuan penghapusan BMN. Dalam triwulan I 2025, BSPJI Samarinda telah menyampaikan surat usulan persetujuan penghapusan BMN kepada Sekretaris Jenderal dan masih menunggu surat persetujuan penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal, sehingga belum dapat dilakukan koordinasi dengan KPKNL Samarinda. Pada proses pengadaan alat laboratorium & pengolah data, tidak dapat terlaksana tepat waktu dikarenakan barang yang akan dipesan dalam kondisi PO. Kondisi ini mempengaruhi kondisi Nilai Aset sepanjang Triwulan I.	Perlu dilakukannya monitoring secara berkala melalui aplikasi SIMAN V2 terkait surat persetujuan penjualan BMN yang akan dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
								B2	a. Koordinasi dengan KPKNL terkait usulan proses penghapusan b. Hunting Penyedia pengadaan alat laboratorium & pengolah data melalui E-Catalog c. Proses Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data Reviu Laporan BMN Unaudited TA. 2024 d. Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	B2	a. Melaksanakan survei harga pasar untuk penentuan HPS pada pengadaan alat laboratorium & pengolah data. b. Melaksanakan Proses Persiapan kelengkapan dokumen untuk Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data c. Melakukan penyusunan Laporan BMN Semester 2 dan Tahunan untuk TA 2024 d. Penyampaian Laporan BMN Unaudited Semester 2 dan Tahunan untuk TA 2024 kepada Biro Keuangan pada tanggal 10 Februari 2025. e. Telah dilakukan reviu oleh Tim APIP dan telah terbit CHR atas Laporan BMN Unaudited Semester 2 dan Tahunan untuk TA 2024. f. Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Januari Tahun 2025 kepada KPKNL Samarinda.						
								B3	a. Penyiapan dokumen usulan penghapusan BMN b. Pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor	B3	a. Melakukan persiapan kelengkapan dokumen untuk pengajuan usulan penghapusan BMN.						

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
										c. Penyiapan proses pengadaan meubelair d. Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	b. Penyampaian Nota Dinas kepada Sekretaris Jenderal tentang permohonan persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau bangunan pada BSPJI Samarinda tanggal 12 Maret 2025. c. Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Februari Tahun 2025 kepada KPKNL Samarinda. d. Melaksanakan survei harga pasar untuk penentuan HPS pada pengadaan meubelair.						
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,5	Persen	30,1	72,53	20%	20%	B1	a. Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU b. Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBP BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	B1	a. Telah dibuat dan disampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU ke PPK BLU pada tanggal 6 Januari 2025 b. Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBP BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 31 Januari 2025	Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja secara tepat waktu setiap bulannya.	Subbag Tata Usaha	Triwulan II-IV
										B2	a. Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU b. Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBP BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c. Monitoring penagihan piutang PNBP BLU	B2	a. Telah dibuat dan disampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU ke PPK BLU pada tanggal 5 Februari 2025 b. Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBP BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 25 Februari 2025 dengan No SP2D				
										B3	a. Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU b. Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBP BLU pada	B3	a. Telah dibuat dan disampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBP BLU ke PPK BLU pada tanggal 6 Maret 2025 b. Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNBP BLU pada				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
											minggu ke IV setiap bulannya		Minggu ke IV yaitu pada tanggal 27 Maret 2025				
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	83	Indeks			25%	25%	B1	a. Membuat laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi TA. 2024 b. Identifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing Ketua Tim c. Perencanaan pelatihan pengadaan Barang/Jasa	B1	a. Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi TA. 2024. b. Penyampaian permohonan usulan kebutuhan pelatihan tahun 2025 kepada masing-masing ketua tim. c. Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi PBJP Lv-1	Pada pelaksanaan kegiatan, secara keseluruhan tidak ditemukan kendala yang menghambat pencapaian indikator kinerja. Pada triwulan I, mulai dari akhir Februari sampai Maret, bertepatan dengan bulan ramadhan sehingga beberapa kegiatan in house training ditunda untuk dilaksanakan. Selain itu, keterbatasan anggaran sebagai dampak dari efisiensi belanja turut menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan karena harus menunggu hasil revisi penetapan blokir belanja.	Dalam menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Hal ini juga dapat menjadi solusi agar kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dapat lebih merata keseluruh pegawai.	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
										B2	a. Membuat program pelatihan tahun 2025 b. Pelaksanaan pelatihan bidang sertifikasi dan pengujian	B2	a. Finalisasi Rencana Pengembangan Kompetensi (Pelatihan) Tahun 2025. b. Pelaksanaan In House Training Pengambilan Contoh Sampel Lingkungan, Mikrobiologi, dan Lingkungan Kerja. c. Pelaksanaan In House Training Pengujian Parameter Bromat pada AMDK. d. Pelaksanaan In House Training Pengujian Parameter pada Aneka Komoditi.				
										B3	a. Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan I b. Revisi kegiatan pengembangan kompetensi	B3	a. Penyampaian Kuesioner Evaluasi Personil yang telah mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi kepada ketua tim. b. Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi untuk Triwulan selanjutnya.				
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	Persen	25%	125%	15%	15%	B1	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	B1	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi	- Integrasi data teknis cukup Kompleks sehingga butuh dilakukan penginputan dan penyesuaian data kembali pada sistem. - Dibutuhkan adanya penyesuaian sumber daya tim pengembang dalam hal teknis laboratorium, khususnya kebutuhan teknis laboratorium dengan kemampuan teknis pemrograman.	Perlu dilakukan sinkronisasi data pada aplikasi SILABISA yang akan dilakukan integrasi dengan sistem Informasi BSKJI	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II - IV
										B2	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	B2	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi				
										B3	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	B3	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen			15%	15%	B1	Membuat data dukung LKE SPBE	B1	Menganalisis penjelasan 38 item LKE SPBE	Pemenuhan data dukung LKE SPBE selain memerlukan proses konsultasi dengan Pusdatin dan Biro Perencanaan, hal ini merupakan tahapan yang baru bagi penanggung jawab SPBE di lingkungan BSPJI Samarinda, pada triwulan I tim PJI masih terkendala kurangnya pemahaman tentang 38 item LKE SPBE dan serta tata cara pemenuhannya.	Mengikuti rapat konsultasi dengan Pusdatin terkait Anggaran dan Aplikasi SPBE sehingga diperoleh pemahaman yang cukup sekaligus memperoleh data dukung yang diperlukan dalam rangka pemenuhan LKE SPBE	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II - IV
										B2	Membuat data dukung LKE SPBE	B2	Menganalisis penjelasan 38 item LKE SPBE				
										B3	Membuat data dukung LKE SPBE	B3	Mengikuti rapat Konsultasi Aplikasi SPBE pada hari Selasa, 18 Maret 2025				
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	4,63	103%	15%	15%	B1	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b. Pelaksanaan reward & punishment c. Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B1	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan public b. Pelaksanaan reward & punishment c. Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	Adanya keterbatasan sumber daya termasuk kompetensi personel dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan dalam Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan nilai indeks pelayanan publik.	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II - IV
										B2	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b. Pelaksanaan reward & punishment c. Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B2	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan public b. Pelaksanaan reward & punishment c. Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan				
										B3	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b. Pelaksanaan reward & punishment c. Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B3	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b. Pelaksanaan reward & punishment c. Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan				
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen			20%	80%	B1	Menyelesaikan seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan kegiatan TA. 2024	B1	a. Penyelesaian bukti pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan tahun 2024 b. Audit kinerja oleh tim inspektorat tanggal 16-31 Januari 2025	Tidak ditemukan kendala dalam pemenuhan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.	Melakukan koordinasi dengan tim APIP secara berkelanjutan apabila dirasakan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program	Subbag Tata Usaha	Triwulan II

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
										B2	Pengumpulan permintaan data dukung untuk keperluan Audit Kinerja Inspektorat	B2	Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit oleh tim inspektorat		maupun pengelolaan di keuangan.		
		SK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	95	Nilai			20%	20%	B3	Koordinasi dengan tim auditor terkait jadwal rencana audit	B3	Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit oleh tim inspektorat				
										B1	a. Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b. Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide Primer, Skunder dan Tersier	B1	a. Melakukan pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b. Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide primer, sekunder dan tersier	Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.	Monitoring berkala untuk kegiatan pada bulan berikutnya	Subbag Tata Usaha	Triwulan II
										B2	a. Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b. Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c. Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal	B2	a. Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b. Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c. Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal				
										B3	a. Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b. Pemberkasan arsip aktif melauai penerapan SRIKANDI c. Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas	B3	a. Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b. Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan srikandi c. Menginput daftar arsip aktif d. Menginput daftar isi berkas				
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,5	Nilai			25%	30%	B1	a. Penyelesaian dan Reviu LAK 2024 b. Penyusunan Revisi RSB 2023-2027 c. Rapat Kerja 2025	B1	a. dan penyampaian LAKIP TA. 2024 b. Penyusunan dan penyampaian Revisi RSB c. Pelaksanaan Rapat Kerja TA. 2025 pada tanggal 17 Januari 2025 d. Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja e) Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 f) Penyusunan Renkin 2026 f) Proses penyiapan data dukung penilaian SAKIP	Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah diupayakan dengan maksimal.	Pada Triwulan ini telah diperoleh penilaian atas SAKIP TA. 2024 yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini akan menjadi standar baru yang mendorong peningkatan kualitas dalam pelaksanaan kinerja di tahun ini. Hal ini menjadi perhatian agar pada tahun ini,	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
										B2	a. Kick Off Pelaksanaan Kegiatan TA. 2025 b. Penyusunan Renkin TA. 2026 c. Evaluasi SAKIP TA. 2024	B2	Penyiapan data dukung penilaian SAKIP		seluruh perbaikan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya agar tetap dijalankan serta setiap catatan atas pelaksanaan kinerja ditahun sebelumnya dapat ditindak lanjuti dengan baik sehingga pada penilaian selanjutnya dapat diperoleh hasil yang lebih baik.		
										B3	a. Pengumpulan usulan KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b. Rapat Money TW 1 c. Pelaporan Money BAPPENAS	B3	a. Pelaksanaan Penilaian SAKIP TA. 2024 b. Pelaksanaan Kick Off Meeting 2025 pada tanggal 24 Maret 2025. c. Penyampaian Nota Dinas terkait Usulan Anggaran dan Kegiatan TA. 2026 d. Persiapan Pelaporan Triwulan I.				
		SK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,2	Nilai	100	106%	24%	24%	B1	d. Revisi DIPA awal dan Pencantuman Saldo Awal e. Penyusunan Rencana Belanja per Kegiatan (Sub Komponen) f. Pengajuan UP g. Pengesahan Penerimaan dan Belanja Januari	B1	a. Pelaksanaan Revisi DIPA dan Pencantuman Saldo Awal yang ditetapkan pada Revisi DIPA 1 tanggal 30 Januari 2025. b. Pelaksanaan belanja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. c. Pengajuan UP dilakukan pada tanggal 31 Januari 2025 dengan No. SP2D 250461301000851 tanggal 7 Februari 2025 d. Pengesahan dilakukan tanggal 31 Januari 2025.	Pada Triwulan I, pelaksanaan anggaran tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat akibat menunggu selesainya proses tagging blokir melalui Revisi DIPA dengan kewenangan DJA. Oleh karena itu, melalui surat Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur No. S-222/WPB.20/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, disampaikan penyesuaian terkait ketentuan penilaian IKPA dengan memberikan nilai 100 pada seluruh indikator IKPA Triwulan I 2025.	Pada Triwulan selanjutnya, setelah proses tagging blokir belanja telah selesai maka pelaksanaan anggaran akan berjalan dengan normal dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pencapaian setiap aspek dalam penilaian IKPA.	Subbag Tata Usaha	Triwulan II
										B2	a. Penyusunan RPD (maks 10 Februari) b. Pelaporan CAPUT Januari c. Pengesahan Penerimaan dan Belanja Februari d. Pengajuan GUP Februari	B2	a. Pelaksanaan Revisi DIPA dalam rangka tagging blokir dan Pemutakhiran Hal III (RPD) b. Permintaan data Laporan Caput c. Pengesahan Penerimaan Belanja dan Pendapatan yang dilakukan tanggal 25 Februari 2025				
										B3	a. Pelaporan CAPUT Februari b. Pengesahan Penerimaan dan Belanja Maret c. Pengajuan GUP Maret d. Monev Penyerapan Anggaran TW 1	B3	a. Pelaporan Caput ke KPPN b. Pengesahan Belanja dan Pendapatan yang dilakukan tanggal 27 Maret 2025 c. Pengajuan UP Nihil pada tanggal 6 Maret 2025 d. Monev realisasi belanja Triwulan I				
8		SK.7.1	Meningkatnya penggunaan	80	Persen	28,69	36%	20%	20%	B1	Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP	B1	Pelaksanaan Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP	Masih minimnya realisasi persentase penggunaan	Melakukan monitoring secara berkala setiap	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
	Terwujudnya SDM yang profesional		Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri							B2	Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE	B2	Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE	produk dalam negeri, yang disebabkan perhitungan persentase hanya diambil berdasarkan 15 akun terpilih yang bersumber dari Rupiah Murni.	bulannya terhadap realisasi pengadaan barang/jasa		
										B3	a) Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium b) Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia	B3	a. Proses persiapan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b. Proses Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia c. Penginputan data Tingkat Penggunaan Komponen Dalam Negeri melalui belanja barang/jasa sesuai akun terpilih dari anggaran Rupiah Murni				
Rata-rata								22%	25,41%								

**TABEL MONITORING RINCIAN OUTPUT JANUARI-MARET 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA**

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Maret	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	AEC Kerja sama	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	126,754,000	9.80%	5	4	21.0%	1	5.0%	2	8.0%	1	8.0%
2			AEF Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	251,340,000	14.40%	500	145	24.0%	45	8.0%	55	8.0%	45	8.0%
3			BAD Pelayanan Publik kepada industri	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,518,360,000	1,518,360,000	4.20%	300	126	20.5%	47	5.0%	55	7.0%	24	8.5%
4				Jasa pelayanan teknis kalibrasi	168,664,000	168,664,000	0%	29	1	20.0%	0	10.0%	1	5.0%	0	5.0%
5				Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955,000	392,393,000	7.80%	44	3	15.0%	0	5.0%	1	5.0%	2	5.0%
6				Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472,000	184,472,000	1.30%	13	2	6.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	3.0%
7			BDI Fasilitas dan Pembinaan Industri	Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522,000	320,522,000	0.80%	10	1	5.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	1.0%
8			CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan	2,007,500,000	1,185,786,000	0%	59	0	9.0%	0	2.0%	0	2.0%	0	5.0%
Total EC					5,465,505,000	4,148,291,000	3.6%									

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Maret	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
9	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000,000	150,000,000	0%	1	0	19.5%	0	8.5%	0	9.0%	0	2.0%
10				Layanan Perkantoran	12,626,995,000	11,699,907,000	31.60%	1	0	25.5%	0	8.5%	0	9.0%	0	8.0%
11			EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	621,000,000	238,374,000	0%	37	0	18.0%	0	6.0%	0	7.0%	0	5.0%
12			EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806,000	292,986,000	11.70%	52	24	20.0%	0	0.0%	24	20.0%	0	0.0%
13			EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370,000	-	0%	1	0	20.0%	0	8.0%	0	8.0%	0	4.0%
14				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	-	0%	1	0	20.0%	0	8.0%	0	8.0%	0	4.0%
15				Layanan Manajemen Keuangan	75,500,000	-	0%	2	1	20.0%	0	8.0%	1	8.0%	0	4.0%
16				Layanan Reformasi Kinerja	21,580,000	21,580,000	0%	1	0	20.0%	0	7.0%	0	5.0%	0	8.0%
17				Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4,620,000	4,620,000	0%	1	0	20.0%	0	8.0%	0	8.0%	0	4.0%
Total WA					14,190,981,000	2,407,467,000	30.3%									
Total					19,656,486,000	16,555,758,000	23.6%									